



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2025 – 2029



H. Herman Deru

Gubernur Sumatera Selatan



H. Cik Ujang

Wakil Gubernur Sumatera Selatan

“Sumatera Selatan Maju Terus Untuk Semua”

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas tersusunnya Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025 – 2029 Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Renstra ini disusun berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Dokumen Rencana Strategis ini secara teknis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi arahan dalam pelaksanaan sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Akhirnya kami berharap semoga penyusunan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Keberhasilan dalam pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Palembang,

2025

**Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,**

Ir. M. Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701230 199203 1 002

Daftar Isi

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR LAMPIRAN vi

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Dasar Hukum Penyusunan 2

1.3 Maksud dan Tujuan 7

1.4 Sistematika Penulisan 9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH..... 11

2.1 Gambar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 11

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis 34

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH.....48

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran..... 48

3.2 Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 56

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN67

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif..... 67

4.2 Program Prioritas Pembangunan Daerah 94

4.3 Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 96

4.4 Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 97

BAB V PENUTUP.....99

LAMPIRAN 101

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)
..... 15

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja..... 15

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon..... 16

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan..... 16

Tabel 2.5 Panjang Ruas Jalan dan Jumlah Jembatan Provinsi
 Sumsel 18

Tabel 2.6 Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan Tahun 2022 -
 2024.....23

Tabel 2.7 Kondisi Jalan Kabupaten / Kota di Sumatera Selatan
 Tahun 2022 - 2024.....24

Tabel 2.8 Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019-
 202425

Tabel 2.9 Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera
 Selatan Tahun 202426

Tabel 2.10 Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2024 28

Tabel 2.11 Daftar Penghargaan Dinas PU Bina Marga dan Tata
 Ruang 30

Tabel 2.12 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan
 Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima)
 Tahun Terakhir 32

Tabel 2.13 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PU Bina Marga
 dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima)
 Tahun Terakhir 33

Tabel 2.14 Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
 Provinsi Sumatera Selatan43

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina
 Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025 –
 2030..... 54

Tabel 3.2 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Renstra
 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang
 Provinsi Sumatera Selatan 2025203.....58

Tabel 3.3	Arah Kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	60
Tabel 3.4	Daftar Proyek Strategis yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	64
Tabel 4.1	Rencana Program, kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....	73
Tabel 4.4	Sub Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang Berkontribusi Terhadap Pencapaian Kesetaraan Gender.....	92
Tabel 4.5	Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029	94
Tabel 4.6	Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	95
Tabel 4.7	Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun	97
Tabel 4.8	Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun	98



Daftar Gambar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.....14

Gambar 3.1 Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan61

Gambar 3.2 Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian RI No.12 Tahun 2024.....63

Gambar 3.3 Peta Lokasi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan
Palembang Baru di Tanjung Carat65

Daftar Lampiran

- Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030
- Tabel 4.3 Rincian Komponen Belanja Rancangan Akhir Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamatkan pemerintah daerah untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) untuk jangka 20 Tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) untuk jangka 5 Tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka 1 Tahun. RPJMD merupakan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan disusun berdasarkan visi dan misi RPJMD Provinsi Sumatera Selatan, memperhatikan analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan serta isu strategis aktual yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah “Sumsel Maju Terus untuk Semua”. Dari visi dan misi jangka panjang tersebut, dapat dirumuskan tujuan dan sasaran sebagai dasar untuk menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan selama Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi perangkat daerah kondisi pada masa depan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan perangkat daerah disertai dengan

indikator kinerja utama dan kerangka pendanaan selama lima tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan.

Dengan tersusunnya perencanaan strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan diharapkan lebih lanjut dapat disusun tahapan pencapaian hasil secara lebih obyektif untuk dapat memberikan komitmen dan orientasi target dan sasaran pada masa depan pada masing - masing kegiatan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

- Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 12. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
 13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
 15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
 25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
 26. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
 27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
 28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
 29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
 30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);

31. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 02 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ((Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 52);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatea Selatan;
36. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35).

1.3 Maksud dan Tujuan

Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD yang tidak bisa dipisahkan, karena pada dasarnya Renstra Perangkat Daerah merupakan bagian dari RPJMD. Implementasi

dari RPJMD Provinsi Sumatera Selatan dituangkan di dalam Renstra masing-masing Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya. Kepala Perangkat Daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah yang harus dipertanggungjawabkan setiap tahun dan akhir masa jabatan.

Renstra Perangkat Daerah memuat gambaran umum pelayanan, isu strategis, tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan Perangkat Daerah. Dalam penyusunannya Perangkat Daerah harus berdasarkan kewenangan Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta isu strategis yang berkembang. Renstra Perangkat Daerah kemudian dijabarkan dalam pelaksanaan program tahunan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang dilengkapi dengan kebutuhan pendanaan dan sumber pendanaan.

Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini tidak hanya berfokus pada peningkatan capaian kinerja, tetapi juga menegaskan komitmen Perangkat Daerah untuk menerapkan prinsip kesetaraan, keadilan dalam setiap tahapan pembangunan. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan akses yang inklusif dan berkeadilan terhadap pelayanan dasar publik, peningkatan kesejahteraan ekonomi kreatif dan responsif gender. Prinsip *no one left behind* menjadi landasan untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata tanpa diskriminasi, sekaligus mengurangi kesenjangan antarwilayah, antarkelompok sosial maupun antarindividu.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, antara lain:

1. Merumuskan suatu dokumen perencanaan yang digunakan sebagai acuan dan panduan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029.

2. Mengidentifikasi permasalahan dan isu-isu pembangunan serta kebijakan perencanaan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
3. Melakukan analisis kebijakan perencanaan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, untuk dapat merumuskan arah kebijakan dan perencanaan yang menjamin tercapai pemanfaatan potensi daerah secara optimal.
4. Memberikan panduan dalam pengukuran kinerja dan sebagai dasar dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan Rencana Strategis.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Berisikan tentang tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah, sumber daya Perangkat Daerah, kinerja penyelenggaraan pelayanan Perangkat Daerah dan kelompok sasaran pelayanan Perangkat Daerah serta identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan penentuan isu-isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisikan mengenai tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan, sub

kegiatan, beserta kinerja, indikator kinerja, target dan pagu indikatif, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan serta target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

Berisikan ringkasan renstra serta langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam mengimplementasi Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambar Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas yang menangani bidang teknis sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merupakan dinas teknis dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang dibentuk melalui Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.

a. Tugas Pokok

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata

Ruang Provinsi Sumatera Selatan, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana unsur pelaksanaan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mempunyai tugas pokok : “Melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang pekerjaan umum bina marga dan tata ruang”

b. Fungsi

Dalam menjalankan tugas pokok tersebut, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan dan perumusan kebijaksanaan teknis pembangunan dan pengelolaan, pembinaan umum, pemberian bimbingan;
- b. Perizinan di bidang kebinamargaan dan penataan ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis di bidang bina marga dan tata ruang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur;
- d. Pembinaan dan bimbingan terhadap Organisasi Perangkat Daerah kabupaten/kota yang bersifat teknis di bidang bina marga dan tata ruang;
- e. Pengkoordinasian penatausahaan, pemanfaatan dan pengamanan barang milik negara/daerah;
- f. Pembinaan administrasi dan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas lingkup Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang; dan
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

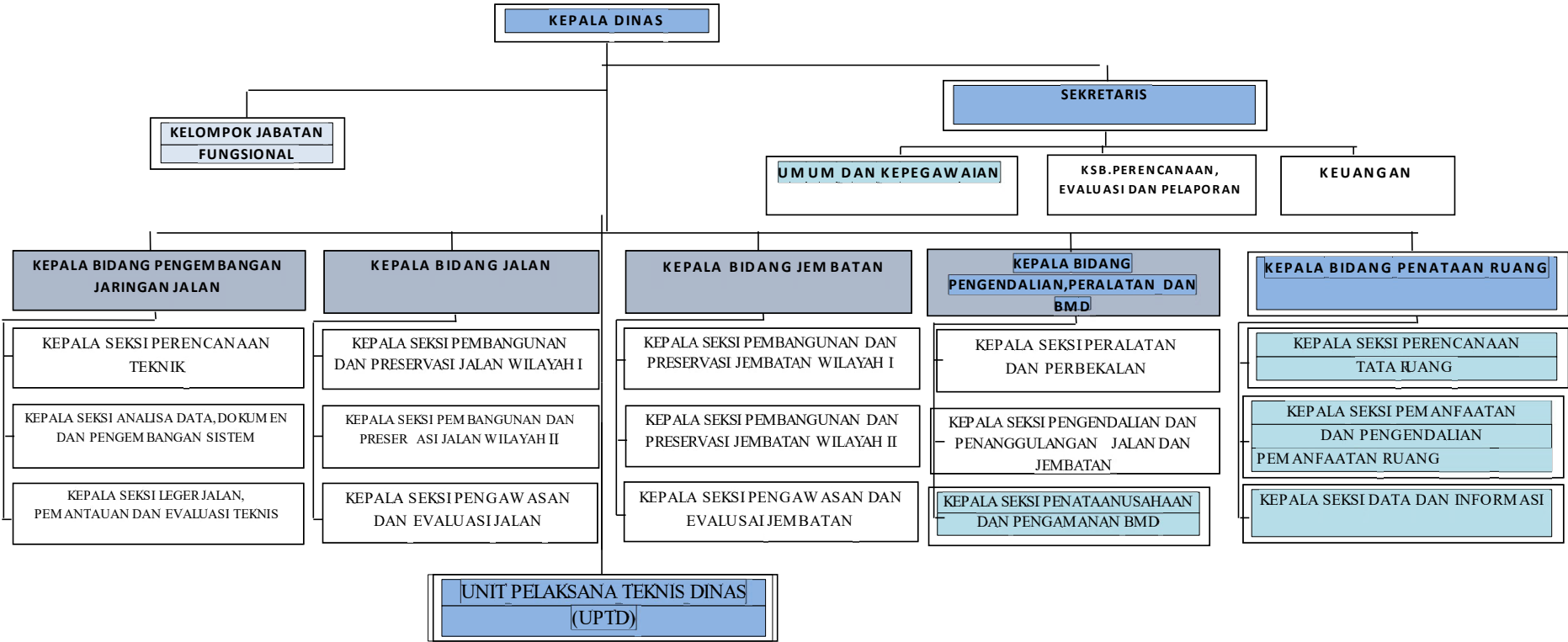
c. Struktur Organisasi

Untuk dapat menjalankan tugas yang telah dibebankan, Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki struktur organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - b. Subbagian Keuangan
 - c. Subbagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
 - a. Seksi Perencanaan Teknik
 - b. Seksi Analisa Data, Dokumen dan Pengembangan Sistem
 - c. Seksi Leger Jalan, Pemantauan dan Evaluasi Teknis
4. Bidang Jalan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jalan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jalan
5. Bidang Jembatan
 - a. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah I
 - b. Seksi Pembangunan dan Preservasi Jembatan Wilayah II
 - c. Seksi Pengawasan dan Evaluasi Jembatan
6. Bidang Pengendalian, Peralatan dan Barang Milik Daerah
 - a. Seksi Peralatan dan Perbekalan
 - b. Seksi Penanggulangan Jalan dan Jembatan
 - c. Seksi Penatausahaan dan Pengamanan BMD
7. Bidang Penataan Ruang
 - a. Seksi Perencanaan Tata Ruang
 - b. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - c. Seksi Data dan Informasi
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas
9. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi secara rinci dapat dilihat pada bagan berikut :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sangat penting guna mendukung optimalnya keberhasilan kinerja suatu instansi sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah. Sampai dengan 30 September 2025, jumlah personil Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebanyak 218 orang. Data pegawai (ASN) dilingkungan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan golongan/ruang, eselon, unit kerja dan tingkat pendidikan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

a. Susunan Kepegawaian

Susunan kepegawaian Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat digambarkan dalam tabel-tabel berikut.

Tabel 2.1. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat (Golongan/Ruang)

No	Golongan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	29	15	44
2	Golongan III	86	66	152
3	Golongan II	19	3	22
4	Golongan I	-	-	-
	Jumlah	134	84	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.2. Komposisi Pegawai Menurut Unit Kerja

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Sekretariat	25	21	46
2	Bidang Pengembangan Jaringan Jalan	7	14	21
3	Bidang Jalan	15	12	27

No	Unit Kerja	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
4	Bidang Jembatan	9	8	17
5	Bidang Pengendalian, Peralatan dan BMD	10	2	12
6	Bidang Penataan Ruang	7	5	12
7	Unit Pelayanan teknis Kegiatan (UPTD)	62	21	83
Jumlah		134	84	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Esselon	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Esselon II	1	-	1
2	Esselon III	12	2	14
3	Esselon IV	27	12	39
	Jumlah Keseluruhan	40	14	54

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Tabel 2.4. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
1	Pasca Sarjana (S2) Teknik	25	11	36
	Pasca Sarjana (S2) Non Teknik	29	22	51
2	Sarjana (S1) Teknik	29	15	44
	Sarjana (S1) Non Teknik	17	27	44
3	Diploma (D4) Teknik	-	-	-
	Diploma (D4) Non Teknik	-	-	-
4	Diploma (D3) Teknik	3	-	3
	Diploma (D3) Non Teknik	4	3	7
5	SLTA Teknik	4	-	4
	SLTA Non Teknik	23	4	27

No	Tingkat Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah (Orang)
6	SLTP/SD	2	-	2
	Jumlah Keseluruhan	136	82	218

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2025

Data diatas menunjukkan bahwa komposisi pegawai laki-laki masih mendominasi dengan selisih 23% lebih tinggi laki-laki dibandingkan perempuan pada Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Komposisi didominasi laki-laki (61,5%) dengan kesenjangan paling besar pada Golongan II dan Golongan IV serta 62,1% laki – laki pada tingkat pendidikan S2. Meskipun perempuan cukup banyak di Golongan III (34,1%), keterwakilan perempuan di Golongan IV masih terbatas pada kompetensi teknis tingkat lanjut.

Pada level Pendidikan terutama pada kompetensi teknis, terdapat kesenjangan signifikan antara jumlah pegawai laki-laki dan Perempuan. Pegawai laki – laki mendominasi dengan selisih sekitar 24,8%, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Kompetensi teknis didominasi laki-laki, terutama pada tingkat S2 dan S1
- Perempuan lebih banyak di bidang non-teknis

Menunjukkan minat/penempatan perempuan lebih pada fungsi administratif/manajerial non-teknis sehingga peluang kepemimpinan teknis bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki untuk mengisi posisi strategis teknis. Tetapi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah memberikan akses, kesempatan dan pengembangan karier bagi Perempuan untuk menjadi pejabat/eselon baik eselon III dan eselon IV.

Kesenjangan ini perlu diatasi melalui intervensi pengarusutamaan gender (PUG) dalam rekrutmen, pengembangan kompetensi dan penataan karier untuk mendukung prinsip kesetaraan dan “no one left behind”. Upaya peningkatan representasi perempuan terutama di level strategis menjadi penting agar tercipta lingkungan kerja yang lebih inklusif dan berkeadilan.

b. Aset Yang Dikelola

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan Kewenangan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai Jalan Provinsi. Sehingga semula ruas jalan provinsi terdiri dari 92 ruas dengan total panjang 2.113,747 Km menjadi 88 ruas dengan total panjang 1.779,27 Km.

Aset yang dikelola oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berupa jaringan jalan provinsi sepanjang 1.779,27 Km yang tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Sementara untuk jembatan provinsi yaitu sebanyak 655 unit jembatan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.5. Panjang Ruas Jalan dan Jumlah Jembatan Provinsi Sumatera Selatan

No	Kabupaten / Kota	Jalan	Jembatan
		(Km)	(Unit)
1	Palembang	74,08	33
2	OKI	53,68	38
3	Ogan Ilir	40,84	80
4	OKU	102,18	41
5	OKU Timur	204,68	86
6	OKU Selatan	101,65	67
7	Muara Enim	269,46	42
8	PALI	192,18	57
9	Lahat	123,48	56
10	Empat Lawang	186,00	63
11	Mura	83,17	40
12	Muratara	146,86	15
13	Muba	113,45	19
14	Banyuasin	59,86	18
15	Lubuklinggau	13,62	
16	Pagaralam	14,10	
Total		1.779,27	655

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Adapun dengan diterbitkannya SK Jalan Kewenangan Nasional Nomor 1688/KPTS/M/2022 tanggal 02 Desember 2022 tentang Penetapan ruas jalan menurut statusnya sebagai Jalan Nasional, Gubernur Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan merevisi kembali SK Penetapan ruas jalan Provinsi Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 tanggal 31 Desember 2021 menjadi SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 Km. Penetapan tersebut akan berpengaruh terhadap aset yang dikelola maupun terhadap kinerja Perangkat Daerah yang pada akhirnya mempengaruhi kinerja Provinsi Sumatera Selatan dalam hal infrastruktur.

2.1.3. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Perangkat Daerah

Rencana Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah perencanaan pembangunan yang merupakan keberlanjutan dari pembangunan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategis pembangunan ke depan tidak lepas dari kondisi real capaian pembangunan tahun sebelumnya. Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memberikan pelayanan secara tidak langsung kepada masyarakat yaitu dengan memberikan pelayanan penyediaan infrastruktur jalan jembatan dan penyelenggaraan penataan ruang terutama kewenangan Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan yang telah mengalami perubahan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 serta Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan, peruntukan Jalan dibagi atas Jalan Umum dan Jalan Khusus. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, sedangkan Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok

masyarakat untuk kepentingan sendiri.

Berdasarkan statusnya, jalan umum dikelompokkan menjadi beberapa bagian :

1. **Jalan Nasional** merupakan jalan Arteri dan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antaribukota Provinsi, jalan strategis Nasional, serta jalan tol.
2. **Jalan Provinsi** merupakan jalan Kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/kota, atau antaribukota Kabupaten/kota, dan jalan strategis Provinsi.
3. **Jalan Kabupaten** merupakan jalan Lokal dalam sistem jaringan jalan Primer yang tidak termasuk dalam Jalan Nasional dan Jalan Provinsi, yang menghubungkan ibukota Kabupaten dengan ibukota Kecamatan, antar ibukota Kecamatan, ibukota kabupaten dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan lokal, serta jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder dalam wilayah Kabupaten, dan jalan strategis Kabupaten.
4. **Jalan Kota** merupakan jalan umum dalam sistem jaringan jalan Sekunder yang menghubungkan antarpusat pelayanan dalam kota, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antarpersil, serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada di dalam kota
5. **Jalan Desa** merupakan jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/ atau antar permukiman di dalam desa, serta jalan lingkungan.

Berdasarkan sifat dan pergerakan pada lalu lintas dan angkutan, jalan umum menurut fungsinya terdiri dari :

1. **Jalan Arteri** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan utama dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi.
2. **Jalan Kolektor** adalah jalan umum yang melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi.
3. **Jalan Lokal** adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat,

kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi.

Fungsi jalan pada sistem jaringan jalan primer dibedakan atas arteri primer, kolektor primer dan lokal primer, adalah sebagai berikut :

1. Jalan arteri primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antar pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
2. Jalan kolektor primer menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
3. Jalan lokal primer menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antar pusat kegiatan lingkungan.

Kinerja pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut statusnya sebagai jalan statusnya sebagai jalan provinsi dengan 88 ruas jalan dan total panjang jalan 1.779,27 Km.

Provinsi Sumatera Selatan mempunyai 3 (tiga) ruas jalan utama, antara lain :

a). Lintas Timur Sumatera

Membentang dari Batas Lampung–Pematang Panggang–Simpang Penyandingan–Kayu Agung–Simpang Indralaya–Palembang–Betung– Batas Jambi sepanjang 405,32 km dan melewati lima kabupaten/kota dan pada umumnya terletak pada daerah dataran rendah serta rawa- rawa.

b). Lintas Tengah Sumatera

Membentang dari batas Lampung Martapura–Baturaja–Simpang Sugiwaras–Muara Enim–Lahat–Tebing Tinggi–Lubuklinggau–Terawas– Batas Jambi sepanjang 472,35 km dan melewati enam kabupaten/kota. Pada umumnya terletak pada daerah dataran tinggi (pegunungan) dan permukaan

bergelombang.

c). Penghubung Antar Jalan Lintas

Pada saat ini jalan nasional yang berfungsi sebagai jalan penghubung antar jalan lintas terdiri dari dua jalan penghubung:

(1). Penghubung Timur dan Tengah Simpang Indralaya–Prabumulih– Muara Enim. Jalan ini sepanjang 147,46 km melewati tiga kabupaten/kota. Secara umum ruas jalan ini terletak pada daerah dataran rendah.

(2). Penghubung Timur Tengah (II) Betung–Sekayu–Muara Beliti sepanjang 253,43 km dan melewati dua kabupaten. Secara umum ruas ini terletak pada daerah dataran rendah dan juga berada di pinggiran Sungai Musi.

(3). Penghubung Alternatif Bagian Timur

Jalan penghubung alternatif antar dua jalan lintas utama (Lintas Timur dan Lintas Tengah) di bagian sebelah timur wilayah Provinsi Sumatera Selatan dilayani ruas jalan Simpang Penyandingan– Simpang Kepuh–Kurungan Nyawa–Martapura sepanjang 138,74 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,50 meter.

(4). Penghubung Alternatif Bagian Tengah-Barat

a).Ruas Jalan Martapura–Ujan Mas–Batas Bengkulu Penangananjalan ini masih secara terus menerus dilaksanakan peningkatannya. Pada ruas jalan ini kondisi geometriknya belum memenuhi persyaratan, sebagian besar alignment vertikal masih bergelombang karena berada di daerah perbukitan.

b).Ruas Jalan Lahat–Pagar Alam–Tanjung Sakti–Batas Bengkulu Jalan ini terletak di dataran tinggi yang rawan longsor dan patahan dengan kondisi jalan dari Pagar Alam menuju Tanjung Sakti–Batas Bengkulu dalam kondisi relatif dengan lebar jalan antara 3,5–4,5 meter.

c).Ruas Jalan Pagar Alam–Tanjung Raya–Batas Bengkulu Panjang ruas jalan ini adalah 52,7 km dengan lebar perkerasan jalan rata-rata 4,5 meter dengan jenis

perkerasan lapisan aspal dengan kondisi 60% baik. Trase jalan terletak di daerah perbukitan dan menyusuri sungai. Lokasi rawan longsor dan daerah patahan.

Pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan tidak terlepas dari mobilitas orang maupun barang yang cukup tinggi. Mobilitas barang dan jasa ditentukan oleh Infrastruktur, salah satunya adalah infrastruktur jalan. Keberadaan infrastruktur jalan menjadi sangat vital karena fungsinya adalah untuk mendukung pencapaian tujuan sosial dan ekonomi masyarakat serta menjamin aksesibilitas antar wilayah. Data menunjukkan bahwa total panjang jalan hingga tahun 2024 sebesar 15.232,283 km. Komposisi jalan tersebut terdiri atas jalan nasional sepanjang 1.580,70 km (10,38%), jalan provinsi sepanjang 1.779,273 km (11,68%) dan jalan kabupaten/kota sepanjang 11.872,31 km (77,94%). Adapun kondisi jalan nasional dan kondisi jalan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2022 – 2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.6. Kondisi Jalan Nasional di Sumatera Selatan
Tahun 2022 - 2024

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun		
		2022	2023	2024
Panjang Jalan		1.600,16	1.581,148	1.580,70
Kondisi Baik	Km	807,22	844,598	832,49
	%	50,45	53,42	52,67
Kondisi Sedang	Km	705,08	690,61	703,52
	%	44,06	43,68	44,51
Kondisi Rusak Ringan	Km	78,45	40,86	41,6
	%	4,90	2,58	2,63
Kondisi Rusak Berat	Km	9,42	5,08	3,1
	%	0,59	0,32	0,2
Kondisi Jalan Mantap	Km	1.512,3	1.535,208	1.536,00
	%	94,51	97,09	97,17

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024



Tabel 2.7. Kondisi Jalan Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan Tahun 2022 – 2024

Kondisi Jalan	Satuan	Tahun					
		2022		2023		2024	
		Kab.	Kota	Kab.	Kota	Kab.	Kota
Panjang Jalan	km	13.747,64	1.905,93	12.609,92	1.905,93	10.170,64	1.701,67
Kondisi Baik	km	4.663,11	578,83	5.137,19	663,47	6.183,78 Km Panjang Jalan Mantap Kabupaten (60,80% Kondisi Jalan Mantap Kabupaten)	1.219,42 Panjang Jalan Mantap Kota (71,66% Kondisi Jalan Mantap Kota)
	%	33,92	30,37	40,74	34,81		
Kondisi Sedang	km	2.191,94	827,22	2.123,45	801,63		
	%	15,94	43,40	16,84	42,06		
Kondisi Rusak Ringan	km	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56	3.986,87 Km Panjang Jalan Tidak Mantap Kabupaten (39,20 Persentase Kondisi Jalan Tidak Mantap Kabupaten)	482,25 Km Panjang Jalan Tidak Mantap Kota (28,34 Persentase Kondisi Jalan Tidak Mantap Kota)
	%	3.701,19	224,66	2.316,36	143,56		
Kondisi Rusak Berat	km	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27		
	%	3.191,39	275,22	3.032,90	297,27		
Kondisi Jalan Mantap	km	6.855,05	1.406,05	7.260,64	1.465,10	6.183,78	1.219,42
	%	49,86	73,77	57,58	76,87	60,80	71,66

Sumber: <https://data.pu.go.id/>, 2024

Kondisi transportasi darat atau jalan tidak terlepas dari kondisi kinerja jaringan jalan yang ada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Pada tahun 2019 sampai dengan 2021 realisasi kondisi kemantapan jalan provinsi menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 130/KPTS/DISPUBM/2016 tanggal 12 Februari 2016 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan primer menurut fungsinya sebagai jalan kolektor-2 dengan panjang 1.513,653 Km, dan untuk tahun 2022 menggunakan SK Jalan kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor 902/KPTS/DIS.PUBMTR/2021 Tanggal 31 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi dengan panjang jalan 2.113,747 km, sedangkan untuk tahun 2023 menggunakan SK Jalan Kewenangan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2023 Nomor 130/KPTS/DIS.PUBMTR/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan dalam Jaringan Primer menurut Statusnya sebagai jalan provinsi dengan panjang jalan sebesar 1.779,27 km. Adapun kondisi jalan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2019–2024, adalah sebagai berikut:

Tabel 2.8. Kondisi Jalan Provinsi di Sumatera Selatan Tahun 2019 – 2024

Kondisi Jalan	Sat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Provinsi					
Panjang Jalan	km	1.513,653	1.513,653	1.513,653	2.113,75	1.779,27	1.779,27
Kondisi Baik	km	857,29	938,15	1.322,02	1.609,01	1.121,60	1.142,531
	%	56,64	61,98	87,34	76,12	63,04	64,21
Kondisi Sedang	km	341,02	424,50	99,89	222,78	446,85	474,572
	%	22,53	28,04	6,60	10,54	25,11	26,67
Kondisi Rusak Ringan	km	163,80	64,42	30,74	56,57	140,13	110,87
	%	10,82	4,26	2,03	2,68	7,88	6,23
Kondisi Rusak Berat	km	151,53	86,58	61,00	225,29	70,71	51,3
	%	10,01	5,72	4,03	10,66	3,97	2,88
Kondisi Jalan	km	1.198,31	1.362,65	1.421,91	1.831,79	1.568,45	1.617,103



Kondisi Jalan	Sat	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		Jalan Provinsi					
Mantap	%	79,17	90,02	93,94	86,66	88,15	90,89

Sumber: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel, 2024

Persentase kondisi jalan mantap merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat. Kemantapan jalan memungkinkan kendaraan untuk mencapai kecepatan yang optimal untuk mempersingkat waktu tempuh. Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Rasio Kemantapan Jalan pada tahun 2023 sebesar 88,15 % dan pada tahun 2024 sebesar sebesar 90,89%. Terdapat kenaikan rasio kemantapan jalan dari tahun 2023 ke tahun 2024 sebanyak 2,74%. Tabel 2.9 menunjukkan kondisi jalan mantap provinsi di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024.

Tabel 2.9. Komposisi Panjang Jalan Menurut Statusnya di Sumatera Selatan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
1	Palembang	74,08	50,83	68,62	19,20	25,92	3,45	4,66	0,60	0,81
2	Banyuasin	53,68	28,43	52,96	16,77	31,24	3,35	6,24	5,13	9,56
3	Musi Banyuasin	40,84	12,95	31,71	20,59	50,42	5,90	14,45	1,40	3,43
4	Ogan Ilir	204,68	106,25	51,91	59,05	28,85	23,63	11,54	15,75	7,69
5	Ogan Komering Ilir	102,18	76,82	75,18	18,48	18,09	4,04	3,95	2,84	2,78
6	Ogan Komering Ulu	101,65	68,92	67,80	28,44	27,98	2,85	2,80	1,44	1,42
7	Komering Ulu Timur	269,46	208,60	77,41	45,00	16,70	9,90	3,67	5,96	2,21
8	Komering Ulu Selatan	192,18	136,89	71,23	49,91	25,97	2,36	1,23	3,02	1,57

No	Kab/Kota	Panjang	Kondisi Jalan Provinsi							
			Baik		Sedang		Rusak Ringan		Rusak Berat	
			(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)	(KM)	(%)
9	Muara Enim	123,48	92,20	74,67	23,28	18,85	5,92	4,79	2,08	1,68
10	Penukal Abab Lematang Ilir	186,00	129,60	69,68	48,95	26,32	5,45	2,93	2,00	1,08
11	Lahat	83,17	44,97	54,07	28,40	34,15	9,20	11,06	0,60	0,72
12	Empat Lawang	146,86	51,38	34,99	57,83	39,38	28,90	19,68	8,75	5,96
13	Musi Rawas	113,45	72,50	63,90	36,27	31,97	3,25	2,86	1,43	1,26
14	Musi Rawas Utara	59,86	48,51	81,04	10,65	17,79	0,40	0,67	0,30	0,50
15	Lubuklin ggau	13,62	4,70	34,51	6,65	48,83	2,27	16,67	0,00	0,00
16	Pagaralam	14,10	9,00	63,83	5,10	36,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1.779,273	1.142,55	64,21	474,57	29,91	110,87	6,7	51,30	2,54
% Kondisi			90,89 (Kondisi Mantap)				9,12 (Kondisi Rusak)			

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Persentase jembatan dengan kondisi baik merupakan gambaran jembatan dalam kondisi NK=0 sampai dengan NK=2, yaitu perhitungan jumlah jembatan dengan NK=0 (Jembatan baru tanpa kerusakan), NK=1 (Kerusakan kecil) dan NK=2 (Kerusakan kecil yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan di waktu mendatang).

Realisasi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik pada Tahun 2024 yaitu sebesar 80,61% dari target pada Tahun 2024 sebesar 80%, sehingga capaian kinerja persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik mencapai 100,76%. Apabila dibandingkan kondisi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik antara Tahun 2023 dengan Tahun 2024, maka telah terjadi kenaikan capaian. Dimana realisasi persentase jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik pada tahun 2023 sebesar 80,46% dan pada Tahun 2024 sebesar 80,61%. Nilai persentase jembatan dalam kondisi baik tahun 2024 di seluruh Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan dapat di lihat pada tabel 2.10. sebagai berikut :

Tabel 2.10. Kondisi Jembatan Provinsi Tahun 2024

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Jembatan (Unit)	Kondisi					
			NK=0	NK=1	NK=2	NK=3	NK=4	NK=5
1	Palembang	33	0	0	28	5	0	0
2	OKI	38	0	0	36	2	0	0
3	Ogan Ilir	80	0	1	57	18	1	3
4	OKU	41	0	1	37	3	0	0
5	OKU Timur	86	0	3	69	13	1	0
6	OKU Selatan	67	0	0	61	5	0	1
7	Muara Enim	42	0	0	26	15	1	0
8	PALI	57	0	2	40	15	0	0
9	Lahat	56	0	1	44	9	2	0
10	Empat Lawang	63	0	1	46	16	0	0
11	Mura	40	0	0	25	13	2	0
12	Muratara	15	0	1	12	2	0	0
13	Muba	19	0	0	16	3	0	0
14	Banyuasin	18	0	0	12	4	2	0
Total		655	0	19	509	120	3	4
% Kondisi			-	2,90	77,71	18,32	0,46	0,61
Jembatan yang terpelihara dalam kondisi baik (%)			80,61					

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Keterangan NK (Nilai Kondisi) :
0 : Jembatan baru dan tanpa kerusakan
1 : Kerusakan kecil
2 : Kerusakan yang memerlukan pemantauan atau pemeliharaan diwaktu mendatang
3 : Kerusakan yang memerlukan tindakan secepatnya
4 : Kondisi kritis
5 : Elemen / Jembatan tidak berfungsi lagi

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Penataan Ruang mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan PERPU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengamanatkan bahwa

penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berdasarkan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.

Sebagaimana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga melakukan penyelenggaraan penataan ruang meliputi perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, berdasarkan urusan bahwa penataan ruang merupakan urusan wajib dengan cakupan pelayanan meliputi 17 (tujuh belas) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil penilaian implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2016 – 2036 terhadap Kesesuaian rencana pola ruang dan struktur ruang didapatkan tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 sebesar 62,5%. Apabila dibandingkan pada persentase capaian tingkat kesesuaian pada Tahun 2023 sebesar 56,00%, maka terdapat peningkatan kesesuaian pemanfaatan ruang.

Indikator kinerja utama sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja utama antara lain :

a. Waktu Tempuh Jalan Provinsi

Waktu tempuh jalan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa kompetitif jaringan jalan suatu daerah. Semakin lama waktu tempuh suatu daerah, maka biaya logistik menjadi semakin mahal. Adapun target waktu tempuh lintas utama jaringan jalan nasional pada Tahun 2029 yaitu 1,7 jam/100 km, sementara target waktu tempuh jalan provinsi pada Tahun 2029 yaitu 2,5 jam/100 km.

b. Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi

Jalan dikategorikan dalam kondisi mantap jika kondisi jalan tersebut dalam kondisi baik dan sedang, sedangkan kondisi tidak mantap jika keadaan jalan tersebut dalam kondisi rusak ringan dan rusak berat. Tingkat kemantapan jalan provinsi

merupakan hal penting untuk memperlancar arus pergerakan kendaraan dalam mendukung pelayanan transportasi masyarakat.

- c. Indeks Penyelenggaraan Pemanfaatan Ruang
- Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang merupakan agregat dari nilai capaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Penataan Ruang.

Sementara indikator kinerja kunci sesuai tugas dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, terdiri dari 7 (tujuh) indikator kinerja kunci antara lain :

- a. Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik
- b. Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi
- c. Persentase Peraturan Tata Ruang yang Ditetapkan
- d. Persentase Pembinaan yang Terlaksana
- e. Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang
- f. Persentase Pengawasan yang Terlaksana
- g. Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah

Dalam kinerja pelayanannya pada tahun 2024 dan 2025 inovasi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan penghargaan antara lain dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut :

Tabel 2.11. Daftar Penghargaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan 2025

NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
1	Penghargaan kepada OPD dengan Belanja PDN Terbesar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2023	Sebagai OPD dengan Belanja PDN Terbesar di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan TA. 2023	Gubernur Sumatera Selatan	26 Januari 2024
2	Penghargaan kepada Perangkat	Kategori Perangkat Daerah	Gubernur Sumatera Selatan	5 Desember 2024



NO	NAMA PENGHARGAAN	KETERANGAN PENGHARGAAN	PEMBERI PENGHARGAAN	TANGGAL DITERIMA
	Daerah yang paling banyak melakukan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender PPR melalui alat Analisa Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) pada program dan kegiatan Tahun 2024.	Responsif Gender pada Peringatan Hari Ibu Ke-96 Tahun 2024		
3	Penghargaan Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 kepada Satker Perangkat Daerah pada Monev Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 Satker DK/TP Mitra KPPN Palembang	Kategori Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2024 dengan Nilai Tertinggi	Kementerian PUPR RI	11 Februari 2025

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

Adapun capaian kinerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan selama 5 (lima) tahun terakhir dari tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.12, sementara untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.13 berikut :



Tabel 2.12
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat konektivitas jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan (%)	100	-	-	100	100	100	100	100	100	100	100			1	1	1		
2	Rasio kemantapan jalan (%)	60	-	-	72	90	80	85	86	90,02	93,94	86,66	88,15	90,89	1,25	1,04	1,08	1,03	1,05
3	Persentase jembatan dengan kondisi baik (%)	-	-	-	93	95	95	95	80	95,39	94,65	83,07	80,46	80,61	1,02	0,99	0,87	0,84	1,007
4	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang(%)	-	-	-	85	60	65	70	-	56,81	56,00	56,00	56,00	-	0,67	0,93	0,86	0,8	-
	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang (%)	-	-	-	-	-	-	-	70	-	-	-	-	62,50	-	-	-	-	0,89

Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024



Tabel 2.13
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan dalam 5 (lima) Tahun Terakhir

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Belanja Tidak Langsung	34.023.216.000					28.163.429.019					0.83				
Belanja Operasi															
Belanja Pegawai		31.885.731.000	37.148.379.000	36.068.214.000	38.049.454.892		27.304.936.345	33.076.314.435	31.487.489.285	33.627.010.899		0,85	0,89	0,87	0,88
Belanja Barang dan Jasa		94.362.282.874	110.551.897.169	109.078.473.852	54.970.567.451		74.443.565.085	92.921.707.018	91.907.856.504	44.156.705.169		0,78	0,84	0,84	0,80
Belanja Langsung	1.409.833.010.907,52					985.789.818.371,67					0.69				
Belanja Modal		1.407.433.778.734	796.948.997.801	624.408.862.021	727.807.672.398		1.148.749.357.537,79	742.229.429.440,46	515.610.976.807,70	675.687.494.891,00		0,81	0,93	0,82	0,92
Total Belanja	1.443.856.226.907,02	1.533.681.792.608	944.649.273.970	769.555.549.873	820.827.684.741	1.013.953.247.390,67	1.250.497.858.967,79	868.227.452.919,46	639.006.324.619,70	753.471.212.983,00	0.70	0.81	0,91	0,83	0,91

Catatan : Realisasi Anggaran Per-tanggal 31 Desember setiap tahunnya
Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, 2024

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dituntut dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat pengguna jalan, seperti peningkatan kualitas jalan dalam kondisi baik dan sedang yang merupakan gambaran dari tingkat kemantapan jalan. Dalam hal penataan ruang, Provinsi Sumatera Selatan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 merupakan acuan sektor dalam pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dan juga dituntut untuk melakukan layanan, koordinasi dan kerjasama dengan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penataan ruang, meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap tertib ruang serta meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu:

1. Belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi daerah
2. Tingginya alih fungsi/konversi lahan
3. Produktivitas sektor pertanian masih rendah
4. Ketahanan pangan yang rentan
5. Adanya kesenjangan infrastruktur antar wilayah
6. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia
7. Masih lambatnya transformasi ekonomi
8. Reformasi birokrasi yang rendah

Potensi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, pada umumnya timbul dari :

1. Kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal
2. Kelemahan yang tidak diatasi

3. Peluang yang tidak dimanfaatkan

4. Ancaman yang tidak diantisipasi

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang.

Permasalahan pelayanan kebinamargaan yang mengacu pada permasalahan pembangunan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, yaitu **kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi** yang disebabkan oleh **masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap**. Infrastruktur yang buruk menyebabkan ketidakefisienan dalam ekonomi. Ketidakefisienan tersebut menimbulkan ekonomi biaya tinggi (*high cost economy*).

Dalam konteks pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, prinsip kesetaraan dalam pembangunan menekankan bahwa setiap individu dan wilayah harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merasakan manfaat pembangunan tanpa adanya diskriminasi. Kesetaraan tidak hanya berarti perlakuan yang sama bagi seluruh masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa kelompok, wilayah, atau masyarakat yang tertinggal mendapatkan perhatian proporsional untuk mengejar ketertinggalannya. Berarti bahwa pembangunan jaringan jalan jembatan harus direncanakan dan dilaksanakan secara berimbang agar seluruh wilayah memiliki akses yang memadai terhadap pelayanan dasar, pusat-pusat ekonomi, fasilitas publik, serta jaringan transportasi. Infrastruktur yang merata akan mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Identifikasi permasalahan dalam urusan kebinamargaan di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya konektivitas jalan dalam mendukung aksesibilitas, sehingga terjadinya kesenjangan infrastruktur antarwilayah.

Kemudahan bagi pengguna jalan untuk mencapai suatu tujuan lokasi masih perlu ditingkatkan, karena ketersediaan sarana jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat untuk memperlancar konektivitas.

2. Menurunnya umur rencana jalan, sehingga masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap.

Kualitas konstruksi jalan mengalami penurunan umur rencana disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : faktor cuaca, dimana curah hujan yang cenderung tinggi dan belum optimalnya pendanaan dalam pemeliharaan jalan dan jembatan

3. Belum optimalnya kapasitas jalan yang ada.

Meningkatnya kondisi kemantapan jalan berdampak pada LHR yang semakin tinggi. Hal ini membutuhkan peningkatan kapasitas jalan, karena kondisi jalan provinsi saat ini rata-rata memiliki lebar jalan 1-5-1 dan 1-6-1. Selain itu, perlu juga penanganan bahu jalan untuk kepentingan keselamatan pengguna jalan.

4. Tingginya frekuensi lalu lintas kendaraan bertonase besar.

Dengan meningkatnya kondisi kemantapan jalan, mengakibatkan arus lalu lintas menjadi lancar dan membuat lalu lintas kendaraan semakin tinggi. Hal ini juga berpengaruh terhadap kendaraan-kendaraan besar bertonase tinggi yang mengangkut hasil-hasil produksi pertanian dan pertambangan semakin leluasa untuk melalui jalan daerah. Selain itu juga, dengan adanya jalan tol yang melalui Provinsi Sumatera Selatan, lalu lintas kendaraan besar pun menjadi semakin padat karena semua akses jalan semakin terbuka.

Identifikasi permasalahan dalam urusan Penataan Ruang di Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

1. Terjadinya dinamika perubahan kebijakan dan peraturan perundang-undangan
2. Belum optimalnya pelaksanaan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3. Belum optimalnya sinkronisasi program sektoral terhadap rencana tata ruang wilayah provinsi

4. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) bidang penataan ruang.
5. Terbatasnya anggaran bidang penataan ruang
6. Masih terbatasnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi penataan ruang

Adapun upaya yang dilakukan oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang dalam mengatasi permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Jalan untuk meningkatkan konektivitas jalan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Provinsi, melalui Sub Kegiatan :
 - a. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
 - b. Pemeliharaan Rutin Jembatan
 - c. Pemeliharaan Berkala Jembatan
 - d. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
 - e. Rehabilitasi Jalan
 - f. Rekonstruksi Jalan
 - g. Pembangunan Jembatan
 - h. Penggantian Jembatan
 - i. Pelebaran Jalan Menuju Standar
 - j. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
 - k. Pembangunan Jalan
 - l. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
 - m. Pengelolaan Leger Jalan
2. Melaksanakan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, melalui Kegiatan dan Sub Kegiatan :
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - 1) Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2) Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 3) Penetapan RTRW Provinsi

- 4) Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
- 5) Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
- 6) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
- b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - 1) Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 2) Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
 - 3) Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
 - 4) Penyusunan RTRW Provinsi
 - 5) Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
 - 6) Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
 - 7) Penyusunan Peta Dasar
 - 8) Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
 - 9) Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
 - 10) Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
- c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - 1) Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
 - 2) Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 3) Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
 - 4) Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - 5) Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
- d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi

- 1) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
- 2) Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
- 3) Pelaksanaan Audit Tata Ruang
- 4) Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
- 5) Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
- 6) Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
- 7) Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
- 8) Penilaian Perwujudan RTR
- 9) Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
- 10) Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
- 11) Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
- 12) Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

2.2.2. Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Pembangunan jangka menengah dalam RPJMN 2025-2029 merupakan fondasi awal yang penting untuk mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Pencapaiannya akan dihadapkan pada isu dan tantangan yang dinamis, baik di tingkat nasional maupun global. Tantangan global perlu dimitigasi sekaligus diubah menjadi peluang untuk memastikan tercapainya sasaran jangka menengah serta mengarahkan pada pembangunan jangka Panjang.

Isu strategis yang menjadi perhatian dalam konteks global serta dapat menjadi risiko global jangka menengah dalam RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029, antara lain : cuaca ekstrem, perubahan kritikal terhadap ekosistem, *biodiversity*, dampak buruk teknologi AI dan gangguan ekosistem, krisis sumber daya alam, misinformasi dan disinformasi, *involuntary*

migration, cyber insecurity, polarisasi sosial dan polusi. Berdasarkan isu strategis global di atas, isu strategis global yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tidak teridentifikasi secara eksplisit.

Isu strategis lingkungan nasional RPJMN 2025-2029 antara lain : rendahnya produktivitas, rendahnya kualitas sumber daya manusia, pergeseran struktur kelas masyarakat, kebutuhan hidup tinggi pada usia produktif, krisis lingkungan, geopolitik dan geoekonomi dan tata kelola dan akuntabilitas pemerintah. Berdasarkan isu strategis nasional di atas, isu strategis nasional yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tidak teridentifikasi secara eksplisit.

Isu strategis regional RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain : ketergantungan komoditas primer dan rendahnya nilai tambah, diversifikasi dan hilirisasi industri belum optimal, kesenjangan infrastruktur antarwilayah, kerentanan dan potensi bencana, ancaman degradasi lingkungan, disparitas kualitas sumber daya manusia, prevalensi stunting yang relatif masih tinggi, tingkat kemiskinan yang relatif masih tinggi, kualitas layanan pendidikan dan kesehatan belum optimal, konektivitas antarwilayah dan kesenjangan infrastruktur digital.

Isu strategis regional di atas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu kesenjangan infrastruktur antarwilayah. Kesenjangan infrastruktur menghambat laju pertumbuhan ekonomi regional. Tanpa infrastruktur yang memadai, biaya logistik menjadi tinggi, akses pasar terbatas dan daya saing investasi menurun, menjauhkan potensi investasi dan pengembangan sektor-sektor produktif. Infrastruktur yang belum memadai berdampak pada aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah untuk menghubungkan daerah sentra produksi dengan pusat-pusat konsumsi.

Investasi pada pembangunan dan pemeliharaan jalan harus menjadi prioritas utama. Dengan infrastruktur yang lebih baik

akan dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, menarik lebih banyak investasi, dan pada akhirnya, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Isu strategis Sumatera Selatan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain :

1. Kemiskinan dan Stunting yang Masih Tinggi
2. Produktivitas Pertanian dan Hilirisasi Komoditi Unggulan Belum Optimal
3. Layanan Pendidikan dan Kesehatan Belum Optimal
4. Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal
5. Mitigasi Bencana Kebakaran Hutan Lahan, Banjir, dan Tanah Longsor Belum Optimal
6. Peningkatan Daya Saing dan Realisasi Investasi Belum Optimal
7. Rendahnya Kapasitas Fiskal dalam Mendorong Pengembangan Wilayah
8. Transformasi Ekonomi dan Transisi Energi Berkeadilan
9. Tata Kelola Pemerintahan dan Stabilitas Sosial

Dari isu strategis diatas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pemerataan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Belum Optimal. Pembangunan infrastruktur regional dan atau lintas wilayah harus diarahkan untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan manusia dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata.

Isu strategis KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2025 - 2029 antara lain :

1. Akselerasi Pengentasan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting
2. Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal
3. Kerentanan Ketahanan Pangan
4. Tata kelola perikanan, pesisir dan pulau-pulau kecil
5. Ancaman Keanekaragaman Hayati
6. Alih Fungsi Lahan dan Gambut
7. Belum Optimalnya Upaya Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

8. Polusi dan Kerusakan Lingkungan
9. Belum Optimalnya Pengelolaan Sumber Daya Air Berkelanjutan

Dari isu strategis diatas yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu Pengembangan Potensi Ekonomi Daerah Belum Optimal. Salah satu permasalahan yang menyebabkan pengembangan ekonomi daerah belum optimal yaitu keterbatasan infrastruktur dan kesenjangan pembangunan antar daerah. Infrastruktur jalan dan jembatan yang kurang memadai membatasi arus distribusi orang dan barang. Akibatnya, daerah-daerah ini kesulitan menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan biaya logistik dan membuat pengembangan sektor-sektor ekonomi potensial menjadi terhambat. Juga pusat-pusat ekonomi cenderung terkonsentrasi di kota-kota besar, sementara daerah-daerah terpencil tertinggal dalam hal infrastruktur, investasi, dan pelayanan publik. Kesenjangan ini memperdalam ketimpangan ekonomi antar wilayah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang merata.

Dengan demikian, isu tersebut bertentangan dengan prinsip kesetaraan yang menuntut bahwa pembangunan harus memberikan manfaat yang merata bagi seluruh masyarakat. Untuk itu, pemerataan infrastruktur jalan jembatan menjadi krusial agar setiap wilayah dapat terhubung dengan baik dan memperoleh akses setara terhadap manfaat pembangunan. Hal ini akan membantu mengurangi kesenjangan antarwilayah, mendorong aktivitas ekonomi serta pembangunan berkelanjutan yang inklusif, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan seluruh masyarakat.

Adapun Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada tabel berikut :



Tabel 2.14. Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PERANGKAT DAERAH *)			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jalan di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari jalan dalam kondisi mantap dan tidak mantap, baik jalan nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Adapun pada Tahun 2024, jalan nasional dalam kondisi mantap sebesar 97,17%, jalan provinsi dalam kondisi mantap sebesar 90,89%, jalan kabupaten dalam kondisi mantap sebesar 60,8%, dan jalan kota dalam kondisi mantap sebesar 71,66%.	Kesenjangan infrastruktur antarwilayah masih tinggi, disebabkan oleh Masih terdapatnya jalan yang berkualitas kurang mantap.	Pengembangan potensi ekonomi daerah belum memadai: 1. Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan dan jembatan; 2. Kesenjangan pembangunan antar daerah.	Tidak teridentifikasi secara eksplisit.	Tidak teridentifikasi secara eksplisit.	Kesenjangan infrastruktur antarwilayah.	Pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal.

Dengan memperhatikan analisa lingkungan eksternal dan internal, isu strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan urusan kebinamargaan dan penataan ruang yaitu :

- a. Kesenjangan infrastruktur antarwilayah di Provinsi Sumatera Selatan masih cukup tinggi, sehingga pemerataan infrastruktur dasar dan konektivitas belum optimal. Kondisi ini berdampak pada terhambatnya arus barang dan jasa, serta belum terwujudnya hubungan ekonomi yang saling melengkapi antarwilayah.
- b. Pembangunan infrastruktur jaringan jalan yang berkeselamatan menuntut kehandalan jaringan jalan Provinsi, yaitu menurunnya waktu tempuh hingga 2,5 Jam/100 Km. Jaringan jalan yang handal dapat terwujud dengan meningkatkan kondisi jalan mantap, meningkatkan kapasitas jalan dan melakukan preservasi jalan sesuai standar dan tepat sasaran.
- c. Meningkatnya permintaan perubahan status jalan kabupaten/kota ke pemerintah provinsi sehingga akan mempengaruhi tingkat kemantapan jalan provinsi.
- d. Kualitas perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- e. Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah melalui Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan (Turbinlakwas) menuju Tertib Ruang.
- f. Kapasitas dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Penataan Ruang.
- g. Pemantapan sinkronisasi program-program RTR dengan dokumen perencanaan pembangunan baik provinsi maupun kabupaten/kota.
- h. Ketersediaan dan kualitas data dan informasi penataan ruang.

Isu Strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan juga berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Provinsi Sumatera Selatan 2024 – 2044. Sistem jaringan jalan meliputi: jalan umum, jalan khusus, jalan tol, terminal penumpang, terminal barang, jembatan timbang dan jembatan.

Jalan umum meliputi jalan arteri dan jalan kolektor. Jalan arteri meliputi 80 (delapan puluh) ruas jalan arteri primer yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Sementara jalan kolektor meliputi:

- a. Jalan kolektor primer satu (JKP-1) yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang meliputi 21 (dua puluh satu) ruas.
- b. Jalan kolektor primer dua (JKP-2) yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi yang meliputi 88 (delapan puluh delapan) ruas.
- c. Rencana pengembangan jalan kolektor primer dua (JKP-2) meliputi ruas:
 1. Jalan Akses Pesisir Timur Kabupaten OKI (Lempuing Jaya – Cengal – Tulung Selapan – Sungsang);
 2. Nibung – Bts. Muba;
 3. Rupit – Lakitan – Karang Dapo; dan
 4. Tanjung Tapa – Sungai Lumpur.

Adapun jalan khusus dikembangkan di Kabupaten Musi Rawan Utara, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Lahat, Kota Prabumulih dan Kota Palembang.

Jalan tol meliputi ruas:

- a. Palembang – Indralaya;
- b. Simpang Indralaya – Muara Enim – bagian dari Trans Sumatera;
- c. Muara Enim – Lahat – Lubuk Linggau – bagian dari Trans Sumatera;
- d. Kayu Agung – Palembang – Betung – bagian dari Trans Sumatera;
- e. Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung;
- f. Betung (Sp. Sekayu) – Tempino – Jambi – bagian dari Trans Sumatera;
- g. Sp. Bandara SMB II – Bts. Kota Palembang/Bts. Kab. Banyuasin (Sp. Bandara SMB II – Jejawi Kabupaten OKI);

- h. Gasing – Sembawa
- i. Sp. Bandara SMB II – Gasing; dan
- j. Rencana Tol Gasing – Tanjung Api-Api/Tanjung Carat.

Penataan Ruang Wilayah Provinsi bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah provinsi yang produktif, berkualitas dan harmonis berbasis potensi sumber daya lokal menuju provinsi unggul yang terdepan secara berkelanjutan. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Provinsi meliputi pengembangan dan peningkatan konektivitas serta aksesibilitas sistem jaringan prasarana wilayah yang berkualitas secara terpadu.

Adapun usulan pembangunan jalan baru dan peningkatan status jalan provinsi baru berdasarkan Rencana Induk Jaringan Jalan Provinsi Sumatera Selatan, yaitu :

1. Jalan Simpang Tiga – Sungai Lumpur
2. Jalan Benakat Minyak – Muara Lakitan
3. Jalan Penghubung PKL Peninjauan – PKL Muara Lakitan
4. Jalan Penghubung PKL Bayung Lencir – Tanjung Lago
5. Jalan Penghubung PKL Muara Rupit – PKL Bayung Lencir
6. Jalan Penghubung PKL Muara Lakitan – PKL Tebingtinggi
7. Jalan Akses KSP Sudut Kepentingan DDL Taman Nasional Sembilang
8. Jalan Akses KSP Sudut Kepentingan SDA & Teknologi Tinggi Rantau Dedep – Segamit (Kota Agung – Rantau Dedep – Segamit)
9. Jalan Akses KSP Sudut Kepentingan SDA & Teknologi Tinggi Kawasan Bukit Lumut Balai, Ulu Danau, Marga Bayur (Gunung Tiga – Bukit Lumut Balai)
10. Jalan Akses KSP Sudut Kepentingan SDA & Teknologi Tinggi Kawasan Bukit Lumut Balai, Ulu Danau, Marga Bayur (Tugu Pahlawan Simpang Haji – Marga Bayur)
11. Jalan Sp. KM 11 (Plakat Tinggi) - Desa Air Balui (Sangga Desa)
12. Jalan Sp. Gunung Kembang - Kembang Tanjung - Bts. Kab. Empat Lawang
13. Jalan Jl. Pangeran Pangging - Bts. Kab. Lahat
14. Jalan Iba - R. Sukanto (Ke Gang R. Masjid & ke Gang Rawasari)
15. Jalan Jl. Silaberanti – Jakabaring

16. Jalan Lingkar Barat - Yos Sudarso (Garuda)
17. Jalan Lingkar - Desa Pengumbuh - Desa Tebing Abang - Bts.
Kab. Muara Enim
18. Jalan Sungai Rengit (Air Batu) - Mekar Mukti (Tanjung Lago)
19. Jalan Sp. Lubuk Batang - Batu Marta Unit III
20. Jalan Jl. Desa Gunung Meraksa - Karta Mulia
21. Jalan Jl. Sukarame (Lahat) - Bandar (Pagar Alam)
22. Jalan Teluk Lubuk - Bts. Kab. PALI
23. Jalan Rambutan - Talang Nangka - Air Sugihan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

3.1.1 Visi dan Misi

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 mencakup beberapa aspek penting dalam rangka mewujudkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Periode Transisi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2026 telah berakhir. Periode pembangunan daerah Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dimulai sejak dilantikannya Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang pada tanggal 20 Februari 2025. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah :

“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”

Visi tersebut mengandung makna sebagai berikut :

Sumsel

Memiliki makna salah satu wilayah di Indonesia yang terletak di bagian Selatan pulau Sumatera. Ibukota Pemerintahan Provinsi Sumatera Selatan berada di Kota Palembang.

Maju

Bermakna bergerak, menjadi lebih baik, berkembang menuju kemajuan pembangunan suatu masyarakat atau daerah kabupaten/kota. Kemajuan pembangunan itu dapat pula bersifat fisik dan nonfisik baik untuk lapisan masyarakat maupun daerah kabupaten/kota yang ada di Sumatera Selatan.

Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berpusat pada Ibukota Provinsi, melainkan diarahkan kepada pemerataan

dan keadilan bagi kemajuan kabupaten dan kota dengan mengutamakan kerja sama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat dengan mengedepankan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Terus

Bermakna kata berkisinambungan dan berkelanjutan serta tidak berhenti yang merujuk pada kemampuan untuk mempertahankan dan memenuhi kebutuhan manusia saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Semua

Mengandung arti keadaan atau kondisi seluruh/segenap/sekalian lapisan masyarakat di wilayah Sumatera Selatan menikmati hasil dari kemajuan pembangunan sedangkan dalam konteks wilayah, keadaan atau kondisi kemajuan pembangunan yang dilakukan secara merata dan adil baik di tingkat kabupaten maupun di kota untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah.

Dengan upaya yang terarah dan sinergi semua pihak, diharapkan visi ini dapat tercapai dan membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan secara menyeluruh. Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan kedalam 7 (tujuh) misi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat Sumatera Selatan yang berkualitas, sehat, cerdas, inovatif, produktif, berakhlak, berkeadilan, dan berkeadaban melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing.
2. Mewujudkan Ketahanan ekonomi berbasis sumber daya lokal dan berkelanjutan dalam kerangka ekonomi kerakyatan yang berkeadilan untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat.
3. Mewujudkan keterkaitan (nexus) yang kuat antara ketahanan pangan, ketahanan energi dan kedaulatan air

sebagai upaya mengatasi perubahan iklim.

4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.
5. Memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja serta perlindungan sosial yang terjaga untuk menurunkan angka kemiskinan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas.
7. Mewujudkan kehidupan beragama, seni dan budaya dalam Masyarakat yang menjunjung tinggi toleransi dan berorientasi pada kearifan lokal.

Dalam rangka mencapai visi “SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA” tersebut dilakukan upaya yang tertuang dalam 7 Misi, dimana dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendukung **Misi IV dan VI dari 7 Misi tersebut, yaitu :**

Misi IV : **“Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”**

dan,

Misi VI : **“Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”**

3.1.2 Tujuan dan Sasaran

Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025-2029 didasarkan pada arahan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan. RPJMD adalah perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi, untuk mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 2025-2030. Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran Visi Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan untuk periode 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sesuai dengan misi RPJMD Tahun 2025-2029 yang didukung, yaitu sebagai berikut :

Misi 4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Tujuan 5. Meningkatnya kualitas konektivitas daerah.

Kualitas infrastruktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa dan meningkatkan aksesibilitas layanan. Aksesibilitas dan kualitas infrastruktur jalan yang baik memungkinkan distribusi barang dan orang menjadi lebih efisien antar daerah, utamanya wilayah desa dan kecamatan.

Sasaran:

Meningkatnya Pemerataan Infrastruktur Konektivitas yang berkualitas

Misi 6. Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas

Tujuan 9. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan

Tata kelola pemerintahan (*government governance*) merupakan struktur dan proses tata kelola yang terdapat dalam instansi pemerintah. Peningkatan tata kelola pemerintahan diperlukan dalam meningkatkan kinerja pemerintahan yang meliputi peningkatan kemampuan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta peningkatan kapabilitas dan integritas aparatur pemerintah daerah yang pada akhirnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

Sasaran:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang)

Dalam mencapai ke-2 misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, Tujuan dan Sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan adalah sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang

Kualitas infrastuktur diperlukan untuk memperkuat hubungan antar wilayah, mempermudah mobilitas barang dan jasa, serta meningkatkan aksesibilitas layanan. Peningkatan akses infrastruktur masyarakat sangat penting agar seluruh kelompok masyarakat dapat menikmati fasilitas dan layanan dasar untuk mendukung kesejahteraan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah. Akses infrastruktur yang baik akan dapat mengurangi beban hidup masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar yang berkeadilan dan dan inklusif bagi semua.

Meningkatnya tata kelola penataan ruang mengacu pada perbaikan sistem, mekanisme dan

praktik penyelenggaraan penataan ruang agar lebih efektif, partisipatif dan berkelanjutan. Sehingga secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan nilai indeks penyelenggaraan penataan ruang (IPPR), terutama pada dimensi ; Pengaturan, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.

Berikut beberapa sasaran yang mendukung tujuan tersebut :

Sasaran :

- 1) Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi
- 2) Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang
- 3) Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang
- 4) Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
- 5) Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
- 6) Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Untuk penjabaran tujuan dan sasaran dari program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel 3.1. berikut.



Tabel 3.1.
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas Indikator : Waktu Tempuh Jalan Provinsi (Jam/100km) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang) Indikator : Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang		(1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (Jam/100Km)	-	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	2,50	
			(2). Target Kemantapan Jalan Provinsi (%)	90,89	91,50	92,04	92,47	92,91	93,33	93,74	
			(3). Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	62,50	65	67,5	70	72,5	75	77,5	
		Meningkatnya kemantapan jalan provinsi	Target Kemantapan Jalan Provinsi (%)	90,89	91,50	92,04	92,47	92,91	93,33	93,74	
			Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	80,61	80,60	81,60	82,60	83,60	84,60	85,60	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE	TAHUN						KET
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
		Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang	Persentase Peraturan Tata Ruang yang Ditetapkan (%)	-	25,00	30,00	30,00	10,00	25,00	60,00	
		Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang	Persentase Pembinaan yang Terlaksana (%)	-	85,71	90,00	92,86	100,00	100,00	100,00	
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	-	97,28	100,00	100,00	100,00	95,00	75,00	
		Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan yang Terlaksana (%)	-	52,00	50,00	57,14	80,00	80,00	75,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang didalamnya terdapat urusan jalan dan jembatan dan urusan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan urusan wajib dan pelayanan dasar mempunyai tugas pokok membantu Gubernur Sumatera Selatan dalam melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di infrastruktur. Dalam mewujudkan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan maka Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan memiliki Strategi dan Arah Kebijakan. Strategi dan arah kebijakan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 disusun dengan memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Perangkat Daerah mencapai tujuan dan sasaran Rencana Strategis dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga perencanaan program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik.

Strategi infrastruktur jalan jembatan dan penataan ruang di Provinsi Sumatera Selatan diarahkan tidak hanya untuk meningkatkan konektivitas wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas serta masyarakat di wilayah tertinggal, memperoleh manfaat yang setara. Infrastruktur yang berorientasi pada aksesibilitas kelompok rentan difokuskan pada peningkatan jangkauan dan kualitas infrastruktur sehingga dapat mengakses fasilitas layanan dasar (seperti fasilitas pendidikan,

kesehatan, sosial, dan pusat kegiatan ekonomi) secara aman, nyaman dan setara tanpa diskriminasi.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029 dirumuskan strategi dan arah kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan misi yang telah ditetapkan. Penahapan pembangunan berisikan prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025-2029. Strategi, arah kebijakan dan penahapan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat pada Tabel 3.2 sebagai berikut :



Tabel 3.2.
Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Penahapan Renstra
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan 2025 – 2030

VISI : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA											
MISI ke – 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan											
MISI ke – 6 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”											
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang	1	Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi	1	Meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan	1	Meningkatkan kemantapan jalan provinsi dengan meningkatkan kualitas pemeliharaan jalan provinsi, serta meningkatkan kualitas struktur dan kapasitas jalan provinsi, melalui : Pemeliharaan Berkala Jalan, Pemeliharaan Rutin Jalan, Rehabilitasi Jalan, Rekonstruksi Jalan, Pelebaran Jalan Menuju Standar dan Pembangunan Jalan di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih.	V	V	V	V	V
					2	Meningkatkan kondisi jembatan provinsi dengan meningkatkan kualitas pemeliharaan jembatan provinsi dan kualitas struktur dan kapasitas jembatan kewenangan provinsi, melalui : Pemeliharaan Berkala Jembatan, Pemeliharaan Rutin Jembatan, Penggantian Jembatan dan Pembangunan Jembatan di 16 Kabupaten/Kota kecuali Kota Prabumulih.	V	V	V	V	V

VISI : SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA											
MISI ke – 4 : Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan											
MISI ke – 6 : Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”											
Tujuan		Sasaran		Arah Kebijakan		Strategi	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	2	Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang	1	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	1	Meningkatkan Pengaturan Penataan Ruang, dengan mewujudkan Perda Rencana Tata ruang dan Pergub Rencana Tata ruang.	V	V	V	V	V
	3	Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang	1	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	1	Meningkatkan Pembinaan Penataan Ruang, dengan mewujudkan koordinasi dan Sosialisasi Penataan Ruang, serta Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang.	V	V	V	V	V
	4	Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang	1	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	1	Meningkatkan Pelaksanaan Penataan Ruang, dengan mewujudkan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang.	V	V	V	V	V
	5	Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang	1	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	1	Meningkatkan Pengawasan Penataan Ruang, dengan mewujudkan Pemantauan Penataan ruang dan evaluasi Penataan ruang.	V	V	V	V	V
	6	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah	1	Meningkatkan kualitas tata kelola	1	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah dengan meningkatkan Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi, dan Pelaporan Perangkat Daerah; Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah; Kualitas Tata Kelola Kepegawaian; serta kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah.	V	V	V	V	V



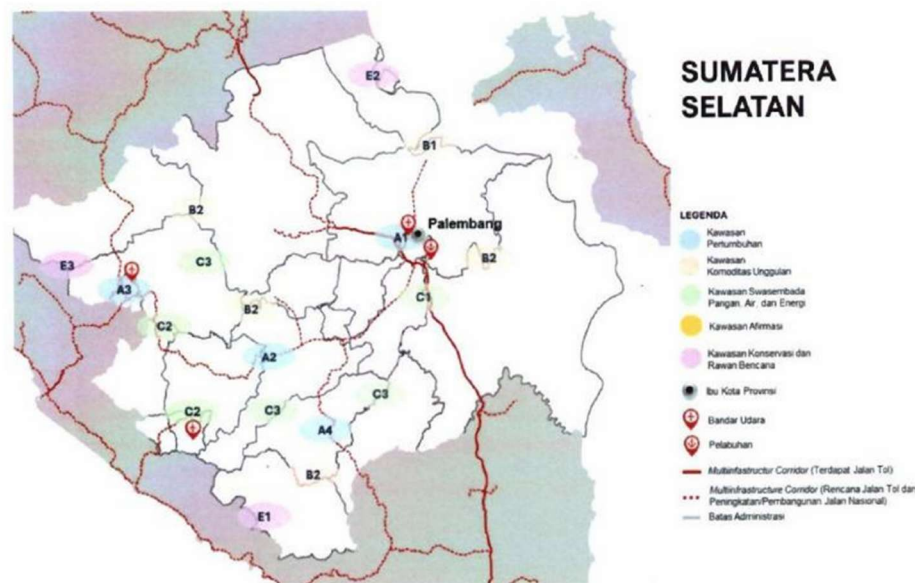
Arah kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Adapun arah kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No.	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra PD	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Konektivitas yang terintegrasi antar kawasan untuk mendukung pergerakan orang dan barang dalam rangka meningkatkan perekonomian dan pembangunan wilayah di Provinsi Sumatera Selatan	Meningkatkan kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan	
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Tata Kelola Penataan Ruang)	Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan berbasis transformasi digital yang didukung oleh kualitas data dan infromasi	Meningkatkan kualitas tata kelola penataan ruang	

Arah Pengembangan Wilayah Provinsi Sumatera Selatan berlandaskan pada RPJMN Tahun 2025-2029 memiliki tema pembangunan sebagai **Mata Rantai Utama Bioindustri dan Kemaritiman Berdaya Saing dan Berkelanjutan**. Peran Provinsi Sumatera Selatan dalam pencapaian jangka menengah wilayah untuk mengurangi kesenjangan dilaksanakan melalui perspektif pembangunan kewilayahan yaitu penguatan ekosistem percepatan pembangunan daerah yang terdiri dari tata ruang, pertanahan, informasi geospasial, layanan dasar, infrastruktur dasar, otonomi dan keuangan daerah. Berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029, pengembangan wilayah Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 4 (empat) Kawasan.

Gambar 3.1. Peta Kawasan di Provinsi Sumatera Selatan



Sumber : Perpres Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029

A. Kawasan Pertumbuhan

1. Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Wilayah Metropolitan Palembang dan Kawasan Pengembangan Industri Palembang-Banyuasin , antara lain:
 - Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang
 - Pembangunan Jalan Tol Betung–Tempino–Jambi dan Jalan Tol Palembang-Prabumulih-Muaraenim-Lahat
 - Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang
2. Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan Muara Enim dan Kawasan Pengembangan Industri Tanjung Enim, antara lain:
 - Pembangunan Jalan Tol Prabumulih-Muaraenim
 - Preservasi Jalan Ruas Muaraenim-Lahat-Pagaralam dan Muaraenim-Baturaja
3. Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan Lubuk Linggau, yaitu Preservasi Jalan Ruas Lubuklinggau – Tebingtinggi - Lahat, Lubuklinggau-Rupit, Lubuklinggau - Curup
4. Infrastruktur Jalan dan Jembatan di Kawasan Perkotaan Baturaja, yaitu Preservasi Jalan Ruas Baturaja-Martapura, Baturaja-Prabumulih, dan Baturaja-Muaradua

B. Kawasan Komoditas Unggulan Ekonomi Biru

1. Banyuasin (Sawit, Karet, Kelapa, Kopi)
2. Cekungan Musi (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir).

C. Kawasan Swasembada Pangan, Air dan Energi Swasembada Pangan

1. Ogan-Komering-Banyuasin (Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur)
2. Musi Hulu (Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Empat Lawang, Kab. Lahat, Kab. Muara Enim, Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Ogan Komering Ilir, Kab. Ogan Ilir, Kab. Ogan Komering Ulu, Kab. Ogan Komering Ulu Timur, Kab. Ogan Komering Ulu Selatan, Kab. Penukal Abab Lematang Ilir)

D. Kawasan Konservasi/Rawan Bencana

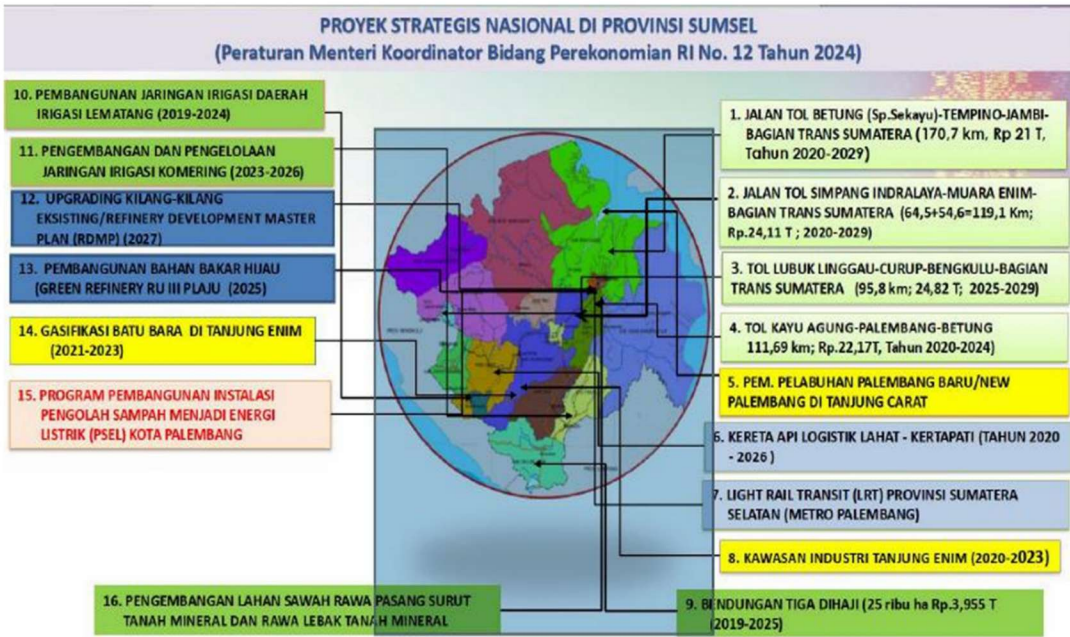
1. Taman Nasional Bukit Barisan Selatan
2. Taman Nasional Sembilang
3. Taman Nasional Kerinci-Seblat

Proyek Strategis Nasional di Provinsi Sumatera Selatan

ditetapkan berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029. Proyek Strategis Nasional yang bersinggungan dengan urusan kebinamargaan dan penataan ruang, yaitu pada Hilirisasi, Industrialisasi dan Transformasi Digital, meliputi :

10. Penyediaan Peta Dasar Skala Besar (1:5.000) seluruh Wilayah Indonesia. Berlokasi di 17 Kabupaten/Kota, dengan pelaksana Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
11. Pembangunan Jalan Tol Terintegrasi dengan Utilitas. Berlokasi di Kabupaten/Kota, dengan pelaksana BUMN (Penugasan).

Gambar 3.2. Peta Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024



Sumber : Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 12 Tahun 2024, terdapat 16 Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan terdiri atas Sektor Jalan dan Jembatan berupa Proyek Jalan Tol, Sektor Pelabuhan berupa Pembangunan Pelabuhan, Sektor Kereta berupa Kereta Api Logistik dan *Light Rail Transit* (LRT), Sektor Kawasan berupa Kawasan Industri (KI), Sektor Bendungan dan Irigasi berupa Pembangunan Jaringan Irigasi, dan Sektor Energi berupa *Upgrading* Kilang-kilang Eksisting, *Green Refinery* (Bahan Bakar Hijau) dan Gasifikasi Batu Bara, serta sektor pertanian berupa pengembangan lahan sawah. Adapun Proyek Strategis di Provinsi Sumatera Selatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yaitu Proyek Jalan Tol dan Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat, dengan lokasi sebagai berikut.



Tabel 3.4. Daftar Proyek Strategis yang berkaitan dengan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No.	Proyek	Lokasi
1	Jalan Tol Betung (SP. Sekayu)-Tempino Jambi-Bagian Trans Sumatra (170,7 Km, Rp. 21 T, Tahun 2020 - 2029)	Betung Kab.Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin,Tempino dan Jambi
2	Jalan Tol Simpang Indralaya-Muara Enim Bagian Trans Sumatra (64,5+54,6=119,1 Km; Rp.24,11 T ; 2020 2029)	Indralaya Kab.Ogan Ilir, Kota Prabumulih, Kab.Muara Enim
3	Tol Lubuk Linggau Curup-Bengkulu Bagian Trans Sumatra (95,8 Km; 24,82 T; 2025-2029)	Kota Lubuk Linggau, Kab. Rejang Lebong, Kab.Kepahiang, dan Kota Bengkulu
4	Tol Kayu Agung Palembang-Betung (111,69 Km; Rp. 22,17 T, Tahun 2020-2024)	Kab.Muara Enim, Kab.Lahat, Kab.Musi Rawas dan, Kota Lubuk Linggau
5	Pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat	Kab. Banyuasin

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

Dalam pembangunan Pelabuhan Palembang Baru/New Palembang di Tanjung Carat, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ikut mendukung Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat. Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat yaitu sepanjang 5,5 Km dengan pagu indikatif sebesar 986,9 Milyar. Adapun telah disiapkan readiness criteria, seperti : Kesiapan Lahan; dan *feasibility Study* dan DED Tahun 2023, serta Amdal Tahun 2024 oleh Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan. Peta lokasi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 3.3. Peta Lokasi Pembangunan Jalan Akses Pelabuhan Palembang Baru di Tanjung Carat



Sumber : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Kawasan Strategis Nasional (KSN) adalah wilayah yang ditetapkan untuk diprioritaskan penataan ruangnya. KSN memiliki pengaruh penting secara nasional, baik dalam bidang kedaulatan, pertahanan, keamanan, ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan, meliputi :

- KSN Kawasan Lingkungan Hidup Taman Nasional Kerinci Seblat;
- KSN Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang;
- KSN Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan;
- KSN Kawasan Perkotaan Palembang Betung Indralaya Kayuagung (Patungraya Agung).

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) merupakan bagian wilayah provinsi yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup wilayah provinsi di bidang ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi dan/atau lingkungan hidup. **Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera**

Selatan, meliputi:

- a. KSP Kawasan Sekayu dan sekitarnya;
- b. KSP Kawasan Lubuklinggau dan Sekitarnya;
- c. KSP Kawasan Pagar Alam dan Sekitarnya;
- d. KSP Kawasan Muara Enim dan sekitarnya;
- e. KSP Kawasan Martapura dan Sekitarnya.

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan meliputi wilayah daerah Kabupaten Banyuasin (Kecamatan Air Salek, Kecamatan Makarti Jaya, Kecamatan Muara Padang dan Kecamatan Muara Sugihan), dan Kabupaten Ogan Komering Ilir (Kecamatan Air Sugihan, Kecamatan Cengal, Kecamatan Pangkalan Lampam, Kecamatan Sungai Menang dan Kecamatan Tulung Selapan. Tujuan pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan adalah untuk mengendalikan ruang di Pesisir Timur Sumatera Selatan untuk mendukung peningkatan ekonomi hijau dan menjamin pembangunan berkelanjutan. Arah pengembangan KSP Kawasan Pesisir Timur Sumatera Selatan di arahkan pada percepatan pertumbuhan Kawasan tertinggal yaitu Kawasan Tulung Selapan - Cengal di Kabupaten Ogan Komering Ilir.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi memuat indikasi program serta pagu indikatif program prioritas yang berisi program-program untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang memuat target Indikasi Program dan Pagu indikatif. Indikasi program merupakan program-program dalam rangka pelaksanaan pembangunan tahun 2025-2029, sedangkan Pagu Indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program – program yang telah disertai kebutuhan pendanaan selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah.

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikatif

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun ke depan, dirumuskan melalui program, kegiatan, sub kegiatan beserta indikator kinerja, pagu indikatif, dan target kinerja perangkat daerah selama lima tahun. Telah ditetapkan masing-masing program Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang akan dicapai, yakni sebagai berikut :

- I. Program Penyelenggaraan Jalan
- II. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
- III. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Program Penyelenggaraan Jalan

1.1 Penyelenggaraan Jalan Provinsi

1.1.1. Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan

Provinsi

- 1.1.2. Pemeliharaan Rutin Jembatan
- 1.1.3. Pemeliharaan Berkala Jembatan
- 1.1.4. Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
- 1.1.5. Rehabilitasi Jalan
- 1.1.6. Rekonstruksi Jalan
- 1.1.7. Pembangunan Jembatan
- 1.1.8. Penggantian Jembatan
- 1.1.9. pelebaran Jalan Menuju Standar
- 1.1.10. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
- 1.1.11. Pembangunan Jalan
- 1.1.12. Survey Kondisi Jalan/Jembatan
- 1.1.13. Pengelolaan Leger Jalan

2. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

- 2.1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
 - 2.1.1. Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2.1.2. Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
 - 2.1.3. Penetapan RTRW Provinsi
 - 2.1.4. Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi
 - 2.1.5. Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
 - 2.1.6. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
- 2.2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
 - 1.2.1. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 - 1.2.2. Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang

- 1.2.3. Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota
- 1.2.4. Penyusunan RTRW Provinsi
- 1.2.5. Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
- 1.2.6. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
- 1.2.7. Penyusunan Peta Dasar
- 1.2.8. Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota
- 1.2.9. Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota
- 1.2.10. Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi

- 2.3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - 2.3.1. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha
 - 2.3.2. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang
 - 2.3.3. Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
 - 2.3.4. Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
 - 2.3.5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

- 2.4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
 - 2.4.1 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
 - 2.4.2 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
 - 2.4.3 Pelaksanaan Audit Tata Ruang
 - 2.4.4 Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
 - 2.4.5 Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar

Teknis Kawasan

- 2.4.6 Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR
- 2.4.7 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
- 2.4.8 Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
- 2.4.9 Penilaian Perwujudan RTR
- 2.4.10 Penilaian Perwujudan RTR
- 2.4.11 Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
- 2.4.12 Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
- 2.4.13 Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK
- 2.4.14 Pemberian insentif dan/atau disinsentif nonfiskal

3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

- 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.1.1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah
 - 3.1.2 Koordinasi dan penyusunan dokumen RKA SKPD
 - 3.1.3 Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD
 - 3.1.4 Koordinasi dan penyusunan DPA SKPD
 - 3.1.5 Koordinasi dan penyusunan perubahan DPA SKPD
 - 3.1.6 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
 - 3.1.7 Evaluasi kinerja perangkat daerah
- 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.2.1 Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - 3.2.2 Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN
 - 3.2.3 Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD

- 3.2.4 Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD
- 3.2.5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- 3.2.6. Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan
- 3.2.7. Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD
- 3.2.8. Penyusunan pelaporan dan analisis prognosis realisasi anggaran
- 3.3. Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.1 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.2 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.3 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
 - 3.3.4 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.4.1 Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai
 - 3.4.2 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
 - 3.4.3 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 3.4.4 Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan
- 3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.5.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 3.5.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3.5.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 3.5.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 3.5.5 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 3.5.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
 - 3.5.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 3.5.8 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - 3.5.9 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
 - 3.5.10 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik pada SKPD

- 3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.6.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3.6.2 Pengadaan Mebel
 - 3.6.3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.7.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pengadaan Mebel
 - 3.7.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3.7.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
 - 3.8.2 Pemeliharaan Mebel
 - 3.8.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 3.8.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran mengenai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2029 secara terinci pada Tabel 4.1 berikut ini :



Tabel 4.1. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Renstra
Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
Meningkatnya pemerataan infrastruktur konektivitas yang berkualitas Indikator : Waktu Tempuh Jalan Provinsi (jam/100 Km)	Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan & Tata Kelola Penataan Ruang				(1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi (km/jam) Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	
		Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi			(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) (2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)	
(1). Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi (%) (2). Persentase Jembatan Dengan Kondisi Baik (%)			Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		(1). Persentase Jalan Provinsi yang dipelihara (%) (2). Persentase Jembatan Provinsi yang dipelihara (%)	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
				Terselenggaranya Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang Jalan yang ditangani (%)	Penyelenggaraan Jalan Provinsi



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi (Km)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin (Meter)	Pemeliharaan Rutin Jembatan
				Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala (Meter)	Pemeliharaan Berkala Jembatan
				Terpantau dan Terevaluasinya Penyelenggaraan Jalan/jembatan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya (Km)	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan
				Terehabilitasinya Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi (Km)	Rehabilitasi Jalan
				Jalan /Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvey kondisinya (Km)	Survey Kondisi Jalan/Jembatan
				Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola	Pengelolaan Leger Jalan
				Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Terpeliharanya Jalan Secara Rutin (Km)	Pemeliharaan Rutin Jalan
				Terlaksananya pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipeliharani dengan Pemeliharaan Berkala (Km)	Pemeliharaan Berkala Jalan
			Meningkatnya Kualitas Struktur dan Kapasitas Jalan dan Jembatan		(1). Persentase Jalan yang ditingkatkan (%) (2). Persentase Panjang Jalan yang Dibangun (%) (3). Persentase Jembatan yang dibangun atau diganti (%)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terawasinya Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi (Km)	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi
				Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan direkonstruksi (Km)	Terekonstruksinya Jalan
				Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	Penggantian Jembatan
				Terlaksananya Pelebaran Jalan Menuju Stansat	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar (Km)	Pelebaran Jalan Menuju Standar
				Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan
				Terlaksananya Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun (Meter)	Pembangunan Jembatan
				Terlaksananya Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun (Km)	Pembangunan Jalan
			Meningkatnya upaya Penertiban Angkutan ODOL (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)		Persentase penurunan kasus ODOL (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)	
		Meningkatnya Keselamatan				



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
		Angkutan Jalan (Cross Cutting dengan Urusan Perhubungan)				
		Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang			Persentase Peraturan Tata Ruang Yang ditetapkan (%)	
			Terwujudnya Perda Rencana Tata ruang		Persentase Perda yang ditetapkan (%)	
						PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
				Terlaksananya Penetapan Dokumen RTR	Persentase Dokumen Penetapan RTR yang ditetapkan (%)	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi
				Tersedianya Perda RTRW Provinsi	Jumlah Perda RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan RTRW Provinsi
				Tersedianya dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda /Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan SK Mendagri hasil evaluasi	Dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi (Dokumen)	Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi
				Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi (Dokumen)	Penyusunan RTRW Provinsi
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi
				Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra keformat ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar (Peta)	Penyusunan Peta Dasar
			Terwujudnya Pergub Rencana Tata ruang		Tingkat Pergub yang ditetapkan (%)	
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
		Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang			Persentase Bentuk Pembinaan Yang Terlaksana (%)	
			Terwujudnya Koordinasi dan Sosialisasi Penataan Ruang		Tingkat Koordinasi dan Sosialisasi yang terlaksana (%)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Prrovinsi
				Tersedianya Dokumen Kebijakan Pelaksanaan Penataan Ruang selain RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi (Dokumen)	Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang
				Tersampaikannya informasi penataan ruang kepada masyarakat	Jumlah publikasi informasi penataan ruang (Publikasi)	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang
				Tersampaikannya substansi pengaturan bidang penataan ruang kepada pemangku kepentingan	Jumlah pemangku kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi (Orang)	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang
				Terlaksananya Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat (Laporan)	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
				Terlaksananya koordinasi fasilitasi pembahasan materi teknis dan ranperda RTRW Kab/Kota	Jumlah berita acara pembahasan RTRW Kab/Kota (Berita Acara)	Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksana Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota dalam rangka penerbitan surat hasil fasilitasi	Jumlah Surat Hasil Fasilitasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi (Dokumen)	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari (Dokumen)	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota
				Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota (Dokumen)	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabuaten/Kota
				Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang (Dokumen)	Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang
				Pelaksanaan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dokumen)	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang
				Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang (Laporan)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang
				Terfasilitasinya forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan provinsi
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang (Laporan)	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
			Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Penataan Ruang		Tingkat Bimtek dan Pendampingan yang terlaksana (%)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
				Terlaksananya kegiatan peningkatan kualitas SDM tata ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan (Orang)	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang
				Terlaksananya Bimbingan,Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Bimbingan, Supervisi, dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Kabupaten/Kota (Laporan)	Pemberian Bimbingan, Supervisi dan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota
		Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang			Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang (%)	
			Terwujudnya Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang		Tingkat Dokumen Sinkronisasi Pemanfaatan yang Tersusun (%)	
				Terlayaninya permohonan dokumen Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku yaitu 20 hari	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlayannya permohonan dokumen KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Jumlah layanan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku (Layanan)	Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha
				Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dokumen)	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang
			Terwujudnya Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang		Persentase Dokumen Sinkronisasi Pengendalian yang Tersusun (%)	
				Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yang Terlaksana (%)	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi
				Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai dengan Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil(PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang (Kasus)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang
				Terlaksananya Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang (Kasus)	Pelaksanaan Audit Tata Ruang



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya tahapan kegiatan Pengenaan Sanksi Administratif	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif (Kasus)	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR
				Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang (Laporan)	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang
				Terselesaikan sengketa penataan ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang (Berita Acara)	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang
		Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang			Persentase pengawasan yang terlaksana (%)	
			Terwujudnya Pemantauan Penataan ruang		Tingkat Pemantauan yang terlaksana (%)	
				Terlaksananya Pengawasan Penataan Ruang	Persentase Pengawasan Penataan Ruang yang terlaksana (%)	Pengawasan Penataan Ruang
				Terlaksananya pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan (Dokumen)	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Pelaksanaan Kesesuaian KegiatanPemanfaatan Ruang	Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dokumen)	Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK
				Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Berita Acara)	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal
			Terwujudnya evaluasi Penataan ruang		Tingkat evaluasi yang terlaksana(%)	
				Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat (Dokumen)	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat
				Terlaksananya pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang (Dokumen)	Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang
				Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan dan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR (dokumen)	Penilaian Perwujudan RTR
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah			Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah (%)	
			Meningkatnya Kualitas Tata kelola Perencanaan,Evaluasi,		Persentase Dokumen PEP yang tersusun (%)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
			dan Pelaporan (PEP) Perangkat Daerah			
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi yang tersusun (%)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
				Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD
				Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Jumlah Dokumen Perubahan DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	
				Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral DaerahTerlaksananya Pengumpulan
				Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektora Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penganggaran dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase Dokumen Penganggaran dan Keuangan yang Tersusun (%)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersusunnya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun (%)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/Bulan)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
				Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
				Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kepegawaian		Persentase Pelayanan Kepegawaian yang Terlaksana (%)	
				Terfasilitasinya Administrasi Pegawai	Persentase Administrasi Pegawai yang difasilitasi (%)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
				Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
				Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan-undangan
				Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana (%)	Administrasi Umum Perangkat Daerah
				Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
				Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
				Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan)	Fasilitasi Kunjungan Tamu
				Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
				Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD
			Meningkatnya kualitas Tata Kelola BMD Perangkat Daerah		Persentase Jenis Tata Kelola BMD Terlaksana (%)	
				Terkelolanya Administrasi BMD	Pesentase Administrasi BMD yang terkelola (%)	Administrasi Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD
				Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Daerah SKPD Daerah SKPD (Laporan)	
				Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD
				Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
				Terlaksananya Target Pengadaan BMD	Persentase target pengadaan yang terlaksana (%)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
				Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Paket)	Pengadaan Mebel
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya jasa penunjang yang terpenuhi	Presentase jasa penunjang yang terpenuhi (%)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	Penyediaan Jasa Surat Menyurat
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR OUTPUT	PROGRAM
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Terpenuhinya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi (%)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya Kendaraan Dinas Jabatan (Unit)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan
				Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Mebel
				Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
				Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Gambaran mengenai Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.2. Sedangkan gambaran mengenai rincian komponen belanja rancangan akhir rencana strategis Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 – 2030 dapat dilihat pada Lampiran Tabel 4.3.

Adapun program, kegiatan dan subkegiatan yang berkontribusi terhadap pencapaian kesetaraan gender, antara lain terdapat pada program penyelenggaraan jalan, kegiatan penyelenggaraan jalan provinsi pada subkegiatan yang tercantum dalam tabel 4.4 berikut :

Tabel 4.4. Sub Kegiatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang Berkontribusi Terhadap Pencapaian Kesetaraan Gender

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	PENJELASAN OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pelebaran Jalan	Terwujudnya pelebaran jalan menuju standar yang handal	Terwujudnya jalan yang sudah dilebarkan sehingga dapat memfasilitasi seluruh masyarakat/pengguna jalan tanpa terkecuali dalam mendapatkan kemudahan akses layanan dasar serta meningkatkan ekonomi di daerah yang dilebarkan pada jalan tersebut
2	Pembangunan Jalan	Terwujudnya pembangunan jalan yang handal	Terwujudnya jalan yang sudah dibangun sehingga memperpendek jarak dan waktu tempuh dari suatu tempat ke tempat lain sehingga pengguna jalan bisa menggunakan akses jalan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat, memperlancar arus distribusi barang yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif

NO	SUB KEGIATAN	OUTPUT	PENJELASAN OUTPUT
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Pemeliharaan Berkala Jalan	Terpeliharanya jalan secara berkala guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat	Terwujudnya pemeliharaan berkala jalan agar kondisi kemantapan jalan dapat dipertahankan untuk digunakan masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari- hari
5	Rekontruksi Jalan	Terwujudnya panjang jalan yang direkonstruksi	Terwujudnya jalan yang sudah direkonstruksi agar kondisi rusak berat pada jalan tersebut kembali mantap sesuai umur rencana sehingga masyarakat / pengguna jalan bisa menggunakan akses jalan tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ekonomi masyarakat dan akses jalan bagi anak sekolah, disabilitas atau kelompok rentan lainnya
5	Rehabilitasi Jalan	Terwujudnya panjang jalan yang direhabilitasi	Terwujudnya jalan yang sudah di rehabilitasi sehingga mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas agar semua lapisan masyarakat bisa mengakses fasilitas layanan dasar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta meningkatkan ekonomi di daerah yang di rehabilitasi pada jalan tersebut tanpa diskriminasi
6	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Terpeliharanya jembatan secara berkala guna meningkatkan aksesibilitas masyarakat	Terwujudnya jembatan yang handal sebagai dasar penghubung antar desa, memberikan kemudahan dalam aktivitas sehari-hari, menaikkan taraf ekonomi masyarakat sekitar dan menjadi jalan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan sehari-hari

4.2. Program Prioritas Pembangunan Daerah

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah perlu memperhatikan korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, dan regional (Provinsi Sumatera Selatan), pencapaian visi dan misi Kepala Daerah (dalam RPJMD), pengembangan sektor/bidang unggulan/kompetitif daerah dan isu strategis daerah. Prioritas pembangunan daerah merupakan arahan bagi Perangkat Daerah dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan sehingga masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan sasaran yang hendak dicapai, nama program, Perangkat Daerah pelaksana serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewajiban daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan dilengkapi dengan tolok ukur kinerja keluaran setiap kelompok program, serta kebutuhan pembiayaannya, untuk dasar perhitungan pagu indikatif setiap program prioritas, maka masing-masing kegiatan disusun berdasarkan skala prioritas.

RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dalam hal ini memuat juga janji-janji politik dari Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih yang secara resmi disampaikan ke KPU, terdiri dari Visi, 7 (tujuh) Misi, dan 12 (dua belas) program strategis (*Sumber : Visi, Misi dan Program H. Herman Deru, S.H., M.M. dan H. Cik Ujang, S.H. yang disampaikan ke KPU Prov. Sumsel*). Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.5. Adapun perumusan sub kegiatan prioritas dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.5. Keterkaitan Misi, Prioritas Pembangunan, dan Program Strategis HDCU RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029

No.	Misi	Prioritas Pembangunan	Program Strategis HDCU
1	Misi 4 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang	Meningkatkan Pemerataan dan Pembangunan Infrastruktur yang	PS 5: Infrastruktur Tuntas Merata • Mempertahankan Sumatera Selatan

No.	Misi	Prioritas Pembangunan	Program Strategis HDCU
	terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	terintegrasi antar Kabupaten/Kota serta Pelayanan Dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan.	pada Kategori Jalan Rusak Terendah di Indonesia • Meningkatkan Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan dalam Wilayah dalam Keadaan Mantap • Melanjutkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten dan Kota melalui BANGUBSUS (Bantuan Keuangan Bersifat Khusus) PS 1: Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat
2	Misi 6 : Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas	Meningkatkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik melalui peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur, kapasitas fiskal, transparansi dan akuntabilitas serta pemanfaatan teknologi informasi menuju pelayanan publik yang berkualitas	PS 10: Sumsel Berintegritas dan Melayani • Melanjutkan dan Meningkatkan Upaya Menciptakan Pemerintahan yang Bersih (Good and Clean Government), Responsive dan Melayani.

Tabel 4.6. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
1	Mewujudkan New Palembang Port Tanjung Carat	Terbangunnya dan Beroperasionalnya New Palembang Port Tanjung Carat	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	1 Pelabuhan
			- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KET.
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	
2	Infrastruktur Tuntas Merata	Meratanya Kemantapan Jalan Provinsi di Seluruh Wilayah	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Tingkat Kemantapan Jalan pada Tahun 2030 sebesar 93,74% dan Persentase Jembatan dalam Kondisi Baik sebesar 85,60%
			- Rehabilitasi Jalan	
			- Rekonstruksi Jalan	
			- Pelebaran Jalan Menuju Standar	
			- Pembangunan Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jalan	
			- Pemeliharaan Berkala Jalan	
			- Pemeliharaan Rutin Jembatan	
			- Pemeliharaan Berkala Jembatan	
			- Pembangunan Jembatan	
			- Penggantian Jembatan	
3	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Mewujudkan Pemerintahan yang Bersih (<i>Good and Clean Government</i>), <i>Responsive</i> dan Melayani	Pembinaan Penataan Ruang	Indeks Penyelenggaran Penataan Ruang pada Tahun 2030 sebesar 77,5
			- Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota	
			- Koordinasi Fasilitasi Ranperkada	
			- RDTR Kabupaten/Kota	
			- Pelaksanaan Penataan Ruang	
			- Pelaksanaan Persetujuan	
			- Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan	

4.3. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU). Indikator Kinerja menjabarkan

uraian ringkas dengan menggunakan ukuran kualitatif atau kuantitatif yang mengidentifikasi pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan. Indikator Kinerja sebagai dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun setelah pelaksanaan. Sebagai petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran, indikator kinerja berfungsi memperjelas tentang suatu kegiatan yang dilaksanakan, menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders dan membangun dasar pengukuran, analisis, dan evaluasi kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 ini ditampilkan dalam tabel berikut.

Tabel 4.7. Indikator Kinerja Utama Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Satuan	Baseline	Target Tahun						Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Waktu Tempuh Jalan Provinsi	Jam/100 km	-	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	2.50	
2	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	90,89	91.50	92.04	92.47	92.91	93.33	93.74	
3	Index Penyelenggaraan Penataan Ruang	index	62.5	65	67.5	70	72.5	75	77.5	

4.4. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintah. Indikator kinerja juga dimaknai sebagai sebagai alat yang digunakan untuk mengukur pencapaian suatu target, baik dengan menggunakan ukuran kualitatif maupun ukuran kuantitatif. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan menunjukkan kinerja yang akan dicapai. Indikator kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dapat dihat pada tabel berikut.



Tabel 4.8. Indikator Kinerja Kunci Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

No	Indikator	Sat	Base line	Target Tahun						Kondisi Akhir	Ket
			2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik (%)	%	80.61	80.60	81.60	82.60	83.60	84.60	85.60	85.60	
2	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi	%	-	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase Peraturan Tata Ruang yang ditetapkan	%	-	25.00	30.00	30.00	10.00	25.00	60.00	60.00	
4	Persentase Pembinaan yang Terlaksana	%	-	85.71	90.00	92.86	100	100	100	100	
5	Persentase Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang	%	-	97.28	100	100	100	95.00	75.00	75.00	
6	Persentase Pengawasan yang Terlaksana	%	-	52.00	50.00	57.14	80.00	80.00	75.00	75.00	
7	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	100	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama tahun 2025 – 2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD Tahun 2025 – 2029 dan bersifat indikatif. Dokumen Rencana Strategis ini secara teknis akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan dan menjadi arahan dalam pelaksanaan sesuai tugas, pokok dan fungsi.

Oleh karena itu, dengan adanya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029 ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan. Keberhasilan dalam pelaksanaan renstra sangat ditentukan oleh kinerja dari seluruh staf dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi dan peran masing-masing secara optimal. Hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten, jujur, transparan, profesional, partisipatif dan penuh tanggung jawab karena akan menentukan keberhasilan pencapaian kinerja program dan kegiatan yang telah disusun.

Dalam rangka mencapai visi **“SUMSEL MAJU TERUS UNTUK SEMUA”** tersebut dilakukan upaya yang tertuang dalam 7 Misi, dimana dalam menjalankan tugasnya, Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan mendukung **Misi IV dan VI dari 7 Misi tersebut, yaitu :**

Misi IV : “Meningkatnya pembangunan infrastruktur yang terintegrasi antar kabupaten/kota dan pelayanan dasar yang berkualitas dan ramah lingkungan”

Misi VI : “Meningkatnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis digital, menuju pelayanan publik yang berkualitas”.

Dalam mencapai kedua misi RPJMD Tahun 2025-2029 tersebut, Tujuan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi

Sumatera Selatan yaitu : “Meningkatnya kualitas pemerataan infrastruktur konektivitas jalan dan Tata kelola penataan ruang”, dengan sasaran Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan, antara lain :

1. Meningkatnya Kemantapan Jalan Provinsi
2. Meningkatnya Pengaturan Penataan Ruang
3. Meningkatnya Pembinaan Penataan Ruang
4. Meningkatnya Pelaksanaan Penataan Ruang
5. Meningkatnya Pengawasan Penataan Ruang
6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi Perangkat Daerah

Dengan demikian, penyusunan Rencana Strategis 2025 – 2029 ini tidak hanya menjadi pedoman arah pembangunan daerah saja, tetapi juga menegaskan pentingnya pengarusutamaan pembangunan sebagai kaidah pelaksanaan yang harus diperhatikan secara konsisten. Selaras dengan RPJMD 2025 – 2029, strategi pembangunan daerah perlu memastikan terwujudnya keadilan melalui perpesktif gender dan inklusi sosial serta keberlanjutan pembangunan untuk generasi mendatang. Dengan komitmen pada prinsip tersebut, diharapkan pembangunan daerah mampu menghadirkan pertumbuhan yang berkualitas, berkeadilan, inklusif untuk semua serta adaptif terhadap dinamika tantangan global serta sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai.

**Kepala Dinas
PU Bina Marga dan Tata Ruang
Provinsi Sumatera Selatan,**

Ir. M. Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701230 199203 1 002

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat kemantapan jalan (%)		91.50%	851,232,635,809.00	92.04%	522,366,476,815.00	92.47%	1,127,685,633,470.00	92.91%	1,212,194,711,838.00	93.33%	1,213,457,054,388.00	93.74%	1,281,888,919,590.00	Prov. Sumsel		
	Rasio kemantapan jalan (%)	90.89%															
Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Persentase Panjang jalan yang ditangani		100.0%	851,232,635,809.00	100.0%	522,366,476,815.00	100.0%	1,127,685,633,470.00	100.0%	1,212,194,711,838.00	100.0%	1,213,457,054,388.00	100.0%	1,281,888,919,590.00	Prov. Sumsel		
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PR				327,060,857,684.00		254,650,000,000.00		633,393,100,000.00		749,657,150,000.00		748,216,129,000.00		823,150,125,450.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi			13,127,906,152.00	2.00 Km	10,080,000,000.00	2.00 Km	10,785,600,000.00	2.00 Km	10,886,400,000.00	2.00 Km	10,987,200,000.00	2.00 Km	11,088,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
BIDANG PPBMD	Jumlah Paket Pengendalian dan Penanggulangan Jalan				50.00 Titik	10,080,000,000.00	54.00 Titik	10,785,600,000.00	54.00 Titik	10,886,400,000.00	56.00 Titik	10,987,200,000.00	60.00 Titik	11,088,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	85,600,000.00	2 Paket	86,400,000.00	2 Paket	87,200,000.00	2.00 Paket	88,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah I Sumsel	Jumlah Paket Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah I Sumsel				25.00 Titik	5,000,000,000.00	27.00 Titik	5,350,000,000.00	27.00 Titik	5,400,000,000.00	28.00 Titik	5,450,000,000.00	30.00 Titik	5,500,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah II Sumsel	Jumlah Paket Pengendalian dan Penanggulangan Jalan Wilayah I Sumsel				25.00 Titik	5,000,000,000.00	27.00 Titik	5,350,000,000.00	27.00 Titik	5,400,000,000.00	28.00 Titik	5,450,000,000.00	30.00 Titik	5,500,000,000.00	Prov. Sumsel		
Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan direkonstruksi		11.36 Km	104,529,211,227.00	8.83 Km	58,860,000,000.00	6.50 Km	65,180,000,000.00	6.75 Km	50,805,000,000.00	7.50 Km	56,450,000,000.00	7.25 Km	54,535,000,000.00	Prov. Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				8.00 Paket	160,000,000.00	9 Paket	180,000,000.00	9 Paket	180,000,000.00	10 Paket	200,000,000.00	8.00 Paket	160,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Rekonstruksi Jalan Akses TPI Sungsang (Banyuasin)	Panjang Jalan direkonstruksi				1.00 Km	7,500,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00			Kab. Banyuasin		
- Rekonstruksi Jalan Plaju - Sp. Sungai Pinang Bts. Kab Oki	Panjang Jalan direkonstruksi										0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Rekonstruksi Jalan KTM. Rambutan – Sp. Lorok	Panjang Jalan direkonstruksi				0.53 Km	4,000,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. OI		
- Rekonstruksi Sp. Meranjat – Bts Kab. Muara Enim	Panjang Jalan direkonstruksi				1.67 Km	12,500,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.50 Km	3,750,000,000.00	Kab. OI		
- Rekonstruksi Jalan Trans Sp. 1 - Sp. Tanah Abang	Panjang Jalan direkonstruksi				0.40 Km	3,000,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. OI		
- Rekonstruksi Jalan Lubuk Seberuk - Sumbu Sari - Mataram Jaya	Panjang Jalan direkonstruksi				1.00 Km	7,500,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00					Kab. OKI		
- Rekonstruksi Jalan Tebing Tinggi - Pendopo (Empat Lawang)	Panjang Jalan direkonstruksi				1.10 Km	8,250,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00			Kab. EMPAT LAWANG		
- Rekonstruksi Jalan Pagaralam – Tanjung Raya	Panjang Jalan direkonstruksi				1.10 Km	8,250,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. EMPAT LAWANG		
- Rekonstruksi Jalan Tanjung Raya – Bts. Prov. Bengkulu	Panjang Jalan direkonstruksi				1.03 Km	7,700,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00		-	Kab. EMPAT LAWANG		
- Rekonstruksi Jalan Sekayu - Bts. Kab. Pali	Panjang Jalan direkonstruksi								0.75 Km	5,625,000,000.00	0.75 Km	5,625,000,000.00	1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. MUBA		
- Rekonstruksi Jalan Sp. Lengkiti - Martapura	Panjang Jalan direkonstruksi										0.75 Km	5,625,000,000.00	1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. OKU		
- Rekonstruki Jalan Bts. Muba - Sp. Air Itam	Panjang Jalan direkonstruksi												1.00 Km	7,500,000,000.00	Kab. PALI		
- Relokasi Jalan Sp. Campang - Sp. Muara Sindang (Tebing Jago)	Panjang Jalan direlokasi						0.50 Km	20,000,000,000.00							Kab. OKU / OKUS		
Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, kebijakan, strategi dan teknis pengembangan jaringan jalan serta perencanaan teknis penyelenggaraan jalan dan jembatan yang disusun		12 Dok	14,989,913,832.00	10.00 Dok	14,500,000,000.00	13.00 Dok	22,995,000,000.00	9 Dok	17,903,375,000.00	8 Dok	16,385,535,250.00	8.00 Dok	16,621,312,012.50	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja administrasi kegiatan	Jumlah Paket				10.00 Paket	400,000,000.00	13.00 Paket	520,000,000.00	9 Paket	360,000,000.00	8 Paket	320,000,000.00	8.00 Paket	320,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey dan Mitigasi Kondisi Lereng dan Tebing pada Ruas Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey Topografi, Hidrologi dan DED Drainase pada Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	1 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey, Mitigasi Resiko dan DED Perkuatan Dinding penahan Tanah pada Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				-	-	1.00 Dokumen	800,000,000.00	1 Dokumen	850,000,000.00	1 Dokumen	850,000,000.00	1.00 Dokumen	900,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Perencanaan Jembatan di Ruas Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	2,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1.00 Dokumen	2,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Perencanaan Teknis Pelebaran Jalan Sultan Mansyur	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00									Provinsi Sumsel		
- Audit Struktur dan Review Design Jembatan Air Betung dan Jembatan Tebat Gheban	Jumlah dokumen yang disusun														Provinsi Sumsel		
- DED dan Dokumen Lingkungan Jalan Akses Menuju Jembatan Musi VI menuju Jalan Gubernur H. Bastari	Jumlah dokumen yang disusun						1.00 Dokumen	1,500,000,000.00							Provinsi Sumsel		
- Audit Struktur Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	2,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1.00 Dokumen	2,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Perencanaan teknis jalan Menuju Sp. Susun Sebidang Gandus	Jumlah dokumen yang disusun						1.00 Dokumen	1,500,000,000.00							Provinsi Sumsel		
- DED dan Dokumen Lingkungan Jalan Akses Menuju Jembatan Musi IV Kota Palembang	Jumlah dokumen yang disusun														Provinsi Sumsel		
- Perencanaan Teknis Jalan Lingkar Timur Palembang	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00									Provinsi Sumsel		
- Dokumen Lingkungan Jalan Lingkar Timur Palembang	Jumlah dokumen yang disusun						1.00 Dokumen	1,500,000,000.00							Provinsi Sumsel		
- Penyusunan Dokumen Kelas Jalan Daerah	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	600,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	1,500,000,000.00					Provinsi Sumsel		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- FS, DED dan Dokumen Lingkungan Pelebaran Jalan Martapura - Sp. Martapura - Muara Dua - Sp. Sender - BTS. Prov. Lampung	Jumlah dokumen yang disusun														Provinsi Sumsel		
- DED Relokasi dan Penanganan Longsor Jalan di Kabupaten OKU dan OKUS.	Jumlah dokumen yang disusun														Provinsi Sumsel		
- Penyusunan Dokumen Lingkungan Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1 Dokumen	2,000,000,000.00	1.00 Dokumen	2,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Audit Struktur Jembatan di Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	2,500,000,000.00	1.00 Dokumen	2,500,000,000.00	1 Dokumen	2,500,000,000.00	1 Dokumen	2,500,000,000.00	1.00 Dokumen	2,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- FS, DED dan Dokumen Lingkungan Pelebaran Jalan Pangeran Ayin (kota	Jumlah dokumen yang disusun						1.00 Dokumen	1,500,000,000.00							Provinsi Sumsel		
- Core Team Perencanaan Dan Pengawasan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumatera	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	3,000,000,000.00	1.00 Dokumen	3,675,000,000.00	1 Dokumen	3,693,375,000.00	1 Dokumen	3,715,535,250.00	1.00 Dokumen	3,901,312,012.50	Provinsi Sumsel		
Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang disurvei kondisinya		1.779,27 Km dan 9.044,780 M	2,787,177,592.00	1.779,27 Km	2,580,000,000.00	1.779,27 Km	2,705,000,000.00	1.779,27 Km	2,836,250,000.00	1.779,27 Km	2,974,062,500.00	1.779,27 Km	3,118,765,625.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja administrasi kegiatan	Jumlah Paket				2.00 paket	80,000,000.00	2.00 paket	80,000,000.00	2 paket	80,000,000.00	2 paket	80,000,000.00	2.00 paket	80,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey Kondisi Jembatan	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1.00 Dokumen	1,050,000,000.00	1 Dokumen	1,102,500,000.00	1 Dokumen	1,157,625,000.00	1.00 Dokumen	1,215,506,250.00	Provinsi Sumsel		
- Survey Kondisi Jalan	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	1,500,000,000.00	1.00 Dokumen	1,575,000,000.00	1 Dokumen	1,653,750,000.00	1 Dokumen	1,736,437,500.00	1.00 Dokumen	1,823,259,375.00	Provinsi Sumsel		
Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang dikelola		2.00 Dokumen	1,801,500,000.00	2.00 Dokumen	890,000,000.00	2.00 Dokumen	1,772,500,000.00	3.00 Dokumen	2,899,125,000.00	2.00 Dokumen	1,950,081,250.00	3.00 Dokumen	3,085,585,312.50	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja administrasi kegiatan	Jumlah Paket				1.00 paket	40,000,000.00	1.00 paket	40,000,000.00	2.00 paket	80,000,000.00	1.00 paket	40,000,000.00	2.00 paket	80,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey LHR Jalan Provinsi	Jumlah dokumen perencanaan teknis jalan dan jembatan								1.00 Dokumen	1,000,000,000.00			1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Survey Indrain di Ruas Jalan Provinsi	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	700,000,000.00	1.00 Dokumen	1,575,000,000.00	1.00 Dokumen	1,653,750,000.00	1.00 Dokumen	1,736,437,500.00	1.00 Dokumen	1,823,259,375.00	Provinsi Sumsel		
- Pengawasan Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-bagian Jalan	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	150,000,000.00	1.00 Dokumen	157,500,000.00	1.00 Dokumen	165,375,000.00	1.00 Dokumen	173,643,750.00	1.00 Dokumen	182,325,937.50	Provinsi Sumsel		
Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian		9.00 Unit	79,633,566,915.00	152.40 Meter	62,640,000,000.00	111.90 Meter	49,845,000,000.00	108.66 Meter	52,037,000,000.00	312.80 Meter	152,540,000,000.00	356.30 Meter	179,085,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				9.00 Paket	180,000,000.00	6.00 Paket	120,000,000.00	7.00 Paket	140,000,000.00	19.00 Paket	380,000,000.00	21.00 Paket	420,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Penggantian Jembatan Air Teras II	Panjang Jembatan yang diganti				20.60 M	8,240,000,000.00									Kab. MURA		
- Penggantian Jembatan Air Kuning	Panjang Jembatan yang diganti				30.00 M	12,000,000,000.00									Kab. MURA		
- Penggantian Jembatan Air Paye	Panjang Jembatan yang diganti				10.60 M	4,240,000,000.00									Kab. MURA		
- Penggantian Jembatan Air Cikni	Panjang Jembatan yang diganti				12.60 M	5,040,000,000.00									Kab. MURA		
- Penggantian Jembatan Air Jernih	Panjang Jembatan yang diganti				8.60 M	3,440,000,000.00									Kab. MURA		
- Penggantian Jembatan Air Tanjung Pasir	Panjang Jembatan yang diganti				8.60 M	3,440,000,000.00									Kab. OI		
- Penggantian Jembatan Air Talang Peramuan	Panjang Jembatan yang diganti				18.60 M	7,440,000,000.00									Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 10+004 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti				8.60 M	3,440,000,000.00									Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 04+000 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti				25.60 M	10,240,000,000.00									Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 08+844 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti				8.60 M	3,440,000,000.00									Kab. OI		
- Pembebasan Lahan Penggantian dan Pembangunan Jembatan	Jumlah Paket Kegiatan				1.00 Keg.	1,500,000,000.00	1.00 Keg.	3,000,000,000.00	1.00 Keg.	3,000,000,000.00	1.00 Keg.	3,000,000,000.00	1.00 Keg.	3,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Penggantian Jembatan Air Lais	Panjang Jembatan yang diganti						18.60 M	7,440,000,000.00							Kab. OKU		
- Penggantian Jembatan Air Macak	Panjang Jembatan yang diganti						50.00 M	20,000,000,000.00							Kab. OKUT		
- Penggantian Jembatan Air KTM	Panjang Jembatan yang diganti						12.60 M	6,000,000,000.00							Kab. OI		
- Penggantian Jembatan Air Buluh	Panjang Jembatan yang diganti						10.60 M	4,240,000,000.00							Kab. Banyuasin		
- Penggantian Jembatan Air Rengas	Panjang Jembatan yang diganti						12.60 M	5,670,000,000.00							Kab. OKUT		
- Penggantian Jembatan Air Apur	Panjang Jembatan yang diganti						7.50 M	3,375,000,000.00							Kab. OKUT		
- Penggantian Jembatan Air Harisan Jaya	Panjang Jembatan yang diganti								15.60 M	7,020,000,000.00					Kab. OKUT		
- Penggantian Jembatan Air Rambutan 4	Panjang Jembatan yang diganti								12.60 M	5,670,000,000.00					Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 05+900 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti								12.60 M	5,670,000,000.00					Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 08+060 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti								8.60 M	3,870,000,000.00					Kab. OI		
Penggantian Jembatan Air Suko Lumbung	Panjang Jembatan yang diganti								10.60 M	4,770,000,000.00					Kab. PALI		
Penggantian Jembatan Air Bungen	Panjang Jembatan yang diganti								18.60 M	8,370,000,000.00					Kab. PALI		
Penggantian Jembatan Air Lembak 2	Panjang Jembatan yang diganti								30.06 M	13,527,000,000.00					Kab. Muara Enim		
Penggantian Jembatan Air Lembak 3	Panjang Jembatan yang diganti										25.60 M	11,520,000,000.00			Kab. Muara Enim		
- Penggantian Jembatan Lebung Jangkar Tengah	Panjang Jembatan yang diganti										12.60 M	5,670,000,000.00			Kab. PALI		
- Penggantian Jembatan Air Bronjol Ketapang 1	Panjang Jembatan yang diganti										18.60 M	8,370,000,000.00			Kab. PALI		
- Penggantian Jembatan Air Rambutan 2	Panjang Jembatan yang diganti										12.60 M	5,985,000,000.00			Kab. OI		
- Penggantian Jembatan STA 07+600 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti							Halaman 2 dari 21			8.60 M	4,085,000,000.00			Kab. OI		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Penggantian Jembatan STA 06+200 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti									8.60 M	4,085,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Metung Baru	Panjang Jembatan yang diganti									25.60 M	12,800,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Buyut Sejangko	Panjang Jembatan yang diganti									10.60 M	5,300,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Rantau Panjang	Panjang Jembatan yang diganti									21.60 M	10,800,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan STA 06+400 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti									11.60 M	5,800,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan STA 06+800 di Ruas Jalan Trans. SP1 - Tanah Abang	Panjang Jembatan yang diganti									10.60 M	5,300,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Beringin	Panjang Jembatan yang diganti									10.60 M	5,035,000,000.00			Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Bengkulah	Panjang Jembatan yang diganti									25.60 M	12,160,000,000.00			Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Jahe	Panjang Jembatan yang diganti									10.60 M	5,035,000,000.00			Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Padang Il	Panjang Jembatan yang diganti									18.60 M	8,835,000,000.00			Kab. Lahat			
- Penggantian Jembatan Air Kedondong I	Panjang Jembatan yang diganti									30.00 M	14,250,000,000.00			Kab. OKU			
- Penggantian Jembatan Air Dua Ratus	Panjang Jembatan yang diganti									8.60 M	4,085,000,000.00			Kab. OKUS			
- Penggantian Jembatan Air Perigi	Panjang Jembatan yang diganti									21.60 M	10,260,000,000.00			Kab.Mura			
- Penggantian Jembatan Air Lakeh	Panjang Jembatan yang diganti									20.60 M	9,785,000,000.00			Kab. Muratara			
- Penggantian Jembatan Air Suban	Panjang Jembatan yang diganti											40.00 M	19,000,000,000.00	Kab. Lahat			
- Penggantian Jembatan Air Cenggol	Panjang Jembatan yang diganti											12.60 M	5,985,000,000.00	Kab. Empat Lawang			
- Penggantian Jembatan Air Rambutan 3	Panjang Jembatan yang diganti											25.60 M	12,160,000,000.00	Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Palu	Panjang Jembatan yang diganti											10.60 M	5,035,000,000.00	Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Ketapang I	Panjang Jembatan yang diganti											10.60 M	5,035,000,000.00	Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Lebung Ilir Pasir	Panjang Jembatan yang diganti											18.60 M	9,300,000,000.00	Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Lebung Ulu Pasir	Panjang Jembatan yang diganti											12.60 M	6,300,000,000.00	Kab. OI			
- Penggantian Jembatan Air Lais	Panjang Jembatan yang diganti											7.50 M	3,750,000,000.00	Kab. Pali			
- Penggantian Jembatan Air Gegas	Panjang Jembatan yang diganti											25.60 M	12,800,000,000.00	Kab.Mura			
- Penggantian Jembatan Air Bukit Ulu	Panjang Jembatan yang diganti											30.00 M	15,000,000,000.00	Kab. Muratara			
- Penggantian Jembatan Air Perikan	Panjang Jembatan yang diganti											25.60 M	12,800,000,000.00	Kab. Lahat			
- Penggantian Jembatan Air Napalan	Panjang Jembatan yang diganti											12.60 M	6,300,000,000.00	Kab. Empat Lawang			
- Penggantian Jembatan Air Maung I	Panjang Jembatan yang diganti											8.60 M	4,300,000,000.00	Kab. Empat Lawang			
- Penggantian Jembatan Air Sukaraja I	Panjang Jembatan yang diganti											8.60 M	4,300,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Campang Tiga	Panjang Jembatan yang diganti											18.60 M	9,300,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Lubuwai	Panjang Jembatan yang diganti											8.60 M	4,300,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Batu Ampar	Panjang Jembatan yang diganti											25.60 M	12,800,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Sekeling	Panjang Jembatan yang diganti											18.60 M	9,300,000,000.00	Kab. Muratara			
- Penggantian Jembatan Air Balak	Panjang Jembatan yang diganti											8.60 M	4,300,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Guhung	Panjang Jembatan yang diganti											8.60 M	4,300,000,000.00	Kab. OKUT			
- Penggantian Jembatan Air Jambu	Panjang Jembatan yang diganti											18.60 M	9,300,000,000.00	Kab. Muratara			
Pemeliharaan Berkala Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala		2.00 Paket	7,546,500,000.00	430.00 Meter	14,080,000,000.00	950.00 Meter	19,090,000,000.00	500.00 Meter	10,080,000,000.00	500.00 Meter	10,080,000,000.00	500.00 Meter	10,080,000,000.00	Prov. Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	80,000,000.00	3.00 Paket	90,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah I	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala				215.00 Meter	7,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jembatan Wilayah II	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala				215.00 Meter	7,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	250.00 Meter	5,000,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jembatan Musi VI dan Flyover Jakabaring Palembang	Panjang Jembatan yang dipelihara secara berkala						450.00 Meter	9,000,000,000.00							Kota Palembang		
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		7.37 Km	44,279,500,000.00	2.75 Km	11,060,000,000.00	22.75 Km	91,380,000,000.00	27.25 Km	109,460,000,000.00	27.25 Km	109,460,000,000.00	23.75 Km	95,400,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				3.00 Paket	60,000,000.00	19.00 Paket	380,000,000.00	23.00 Paket	460,000,000.00	23.00 Paket	460,000,000.00	20.00 Paket	400,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pelebaran Jalan Kurungan Nyawa – Gumawang	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar						1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00			Kab. OKUT		
- Pelebaran Jalan Petanggan – Tj. Kemuning – Bts. Kab. OKI	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pelebaran Jalan Gumawang – Petanggan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar						1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pelebaran Jalan Betung - Petanggan	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar				1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pelebaran Jalan Kurungan Nyawa – Martapura	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT			
- Pelebaran Jalan Martapura - Sp. Martapura	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT			
- Pelebaran Jalan BTS. KAB. OKI - SP. KEPUH	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar							1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT			
- Pelebaran Jalan GUMAWANG - RASUAN (SP. KEPUH)	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar							1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKUT			
- Pelebaran Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. PALI) - Bts. Kab. Mura	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			0.75 Km	3,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	Kab. PALI			
- Pelebaran Jalan Muara Siban - Sp. Embacang	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	Kab. Lahat			
- Pelebaran Jalan Sekayu - BTS. Kab. PALI	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			-				1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	Kab. Muba			
- Pelebaran Jalan Sultan M. Mansyur (Palembang)	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pelebaran Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					2.25 Km	9,000,000,000.00	2.25 Km	9,000,000,000.00	2.25 Km	9,000,000,000.00	2.25 Km	9,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pelebaran Jalan Pangeran Ayin (Kota Palembang) - Bts. Kab. Banyuasin	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pelebaran Jalan Sp. Martapura - Muara Dua	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00			kab. OKUS			
- Pelebaran Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir- Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII)	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKU			
- Pelebaran Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKU			
- Pelebaran Jalan Sp. Sukajadi (Baturaja) - Sp. Lengkiti	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	Kab. OKU			
- Pelebaran Jalan Sp. Lengkiti - Sp Martapura	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKU			
- Pelebaran Jalan Muara Dua - Sp. Sender	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar							1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKU			
- Pelebaran Jalan Sp. Periuk - Tugu Mulyo - Terawas	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar			-	-	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	Kab. MURA			
- Pelebaran Jalan HANDAYANI (KOTA LUBUK LINGGAU) - TUGUMULYO (KAB. MUSI RAWAS)	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	6,000,000,000.00			Kota Lubuk Linggau			
- Pelebaran Jalan Sp. Penyandingan - Bts. Kab. OKUT	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar					1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	4,000,000,000.00	Kab. OKI			
Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang penyelenggaraannya diawasi		1,779.27 Km	31,703,633,831.00	1,779.27 Km	28,000,000,000.00	1,779.27 Km	29,700,000,000.00	1,779.27 Km	31,185,000,000.00	1,779.27 Km	32,744,250,000.00	1,779.27 Km	34,381,462,500.00	Prov. Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan		33.00 Dokumen	31,703,633,831.00	33.00 Dokumen	28,000,000,000.00	35.00 Dokumen	29,700,000,000.00	35.00 Dokumen	31,185,000,000.00	35.00 Dokumen	32,744,250,000.00	35.00 Dokumen	34,381,462,500.00	Prov. Sumsel		
Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang dibangun		1.00 Unit	9,413,250,000.00	60.00 Meter	24,020,000,000.00	220.00 Meter	88,040,000,000.00	203.70 Meter	91,745,000,000.00	60.60 Meter	29,825,000,000.00	20.60 Meter	10,835,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	20,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	4.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pembangunan Jembatan Air Arisan Mendang	Panjang Jembatan yang dibangun				60.00 Meter	24,000,000,000.00									Kab. OI		
- Pembangunan Jembatan Air Betung	Panjang Jembatan yang dibangun						130.00 Meter	52,000,000,000.00							Kab. Lahat		
- Pembangunan Jembatan Air Tebat Gheban	Panjang Jembatan yang dibangun						90.00 Meter	36,000,000,000.00							Kota Pagar Alam		
- Pembangunan Jembatan Air Lebung Jangkar Ilir	Panjang Jembatan yang dibangun								80.00 Meter	36,000,000,000.00					Kab. OI		
- Pembangunan Jembatan Air Arisan Bujung	Panjang Jembatan yang dibangun								40.00 Meter	18,000,000,000.00					Kab. OI		
- Pembangunan Jembatan Air Lubuk Keliat Kecil	Panjang Jembatan yang dibangun								61.20 Meter	27,540,000,000.00					Kab. OI		
- Pembangunan Slab on Pile di Ruas Jalan SP. Belimbing - Pendopo (PALI)	Panjang Jembatan yang dibangun								22.50 Meter	10,125,000,000.00					Kab. PALI		
- Pembangunan Jembatan Air Lebung Jangkar Ulu	Panjang Jembatan yang dibangun										20.60 Meter	9,785,000,000.00			Kab. OI		
- Pembangunan Jembatan Air Semar	Panjang Jembatan yang dibangun										40.00 Meter	20,000,000,000.00			Kab. OI		
- Pembangunan Jembatan Air Sebela	Panjang Jembatan yang dibangun												20.60 Meter	10,815,000,000.00	Kab. Muratara		
Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin		2.00 Paket	5,046,500,000.00	500.00 Meter	5,080,000,000.00	600.00 Meter	6,080,000,000.00	600.00 Meter	6,080,000,000.00	600.00 Meter	6,080,000,000.00	600.00 Meter	6,080,000,000.00	Prov. Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	2.00 Paket	80,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah I Sumsel	Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin				250.00 Meter	2,500,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	Prov. Sumsel		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pemeliharaan Rutin Jembatan Wilayah II Sumsel	Panjang Jembatan yang dipelihara secara rutin				250.00 Meter	2,500,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	300.00 Meter	3,000,000,000.00	Prov. Sumsel		
Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang dibangun		1.00 Km	11,989,198,135.00	0.98 Km	22,060,000,000.00	1.20 Km	245,020,000,000.00	5.50 Km	363,040,000,000.00	7.50 Km	318,040,000,000.00	11.50 Km	398,040,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja administrasi kegiatan	Jumlah Paket				3.00 Paket	60,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	2 Paket	40,000,000.00	2 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Penanganan Longsor an Sp. Haji – Sp. Campang (Desa Talang Baru)	Panjang Penanganan Longsor an				0.10 Km	5,000,000,000.00									Kab. OKUS		
- Penanganan Longsor an Jl. Muara Dua - Sp. Sender (Desa Banjar Agung)	Panjang Penanganan Longsor an				0.08 Km	7,500,000,000.00											
- Pembangunan Jalan Cempaka - Trans SP. 1	Panjang Jalan yang dibangun				0.80 Km	8,000,000,000.00	1.20 Km	12,000,000,000.00	1.00 Km	10,000,000,000.00					Kab. OKUT		
- Pembebasan Lahan Pembangunan Jalan	Jumlah Paket Kegiatan				1.00 Keg.	1,500,000,000.00	3.00 Keg.	233,000,000,000.00	1.00 Keg.	283,000,000,000.00	1.00 Keg.	203,000,000,000.00	1.00 Keg.	223,000,000,000.00	2027 dimulai Pembebasan Lahan Akses Musi IV (230 M) dan Jalan Akses menuju Sp. Susun Sebidang (400 M), serta Pembebasan lahan Jl. Lingkar Timur (300M)		
- Pembangunan Jalan Lingkar Timur Palembang	Panjang Jalan yang dibangun								2.00 Km	30,000,000,000.00	5.00 Km	75,000,000,000.00	9.00 Km	135,000,000,000.00	Kab. Banyuasin (Kebutuhan Dana 450M eff perkiraan ± 32km, dimulai dari tahun 2028 s.d 2032)		
- Pembangunan Jalan Akses Menuju Sp. Susun Sebidang Gandus	Panjang Jalan yang dibangun								2.50 Km	40,000,000,000.00	2.50 Km	40,000,000,000.00	2.50 Km	40,000,000,000.00	Kota Palembang		
Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang dipantau dan dievaluasi penyelenggaraannya		1,779.27 Km	213,000,000.00	1,779.27 Km	800,000,000.00	1,779.27 Km	800,000,000.00	1,779.27 Km	700,000,000.00	1,779.27 Km	700,000,000.00	1,779.27 Km	800,000,000.00	Prov. Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan				1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jembatan	Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan				1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	Prov. Sumsel		
- Kajian Forensik Longsor an di Ruas Jalan Provinsi	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Jalan yang dievaluasi				1.00 Dokumen	400,000,000.00	1.00 Dokumen	400,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	400,000,000.00	Prov. Sumsel		
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKU				83,748,159,390.00		37,658,300,000.00		84,445,750,000.00		48,105,750,000.00		48,105,750,000.00		48,105,750,000.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		3.92 Km	19,626,500,000.00	2.00 Km	10,040,000,000.00	0.30 Km	35,020,000,000.00							Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKU	Panjang Jalan yang direhabilitasi				2.00 Km	10,040,000,000.00	0.30 Km	35,020,000,000.00									
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	20,000,000.00							Provinsi Sumsel		
- Penanganan longsor an Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir- Peninjauan (Desa Kedaton)	Panjang Jalan yang Ditangani				1.00 Km	5,000,000,000.00	0.10 Km	15,000,000,000.00							Kab. OKU		
- Penanganan longsor an Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang (Desa	Panjang Jalan yang Ditangani				1.00 Km	5,000,000,000.00	0.20 Km	20,000,000,000.00							Kab. OKU		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara		293.83 Km	2,764,800,000.00	293.83 Km	2,978,300,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKU	Panjang Jalan yang Dipelihara				293.83 Km	2,978,300,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00	293.83 Km	7,385,750,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKU	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				101.65 Km	1,016,500,000.00	101.65 Km	2,541,250,000.00	101.65 Km	2,541,250,000.00	101.65 Km	2,541,250,000.00	101.65 Km	2,541,250,000.00	Kab. OKU		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUS	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				192.18 Km	1,921,800,000.00	192.18 Km	4,804,500,000.00	192.18 Km	4,804,500,000.00	192.18 Km	4,804,500,000.00	192.18 Km	4,804,500,000.00	Kab. OKUS		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara		15.74 Km	61,356,859,390.00	8.14 Km	24,640,000,000.00	14.00 Km	42,040,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKU	Panjang Jalan yang Dipelihara				8.14 Km	24,640,000,000.00	14.00 Km	42,040,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00	13.50 Km	40,720,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				11.00 Paket	220,000,000.00	12.00 Paket	240,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lengkiti - Sp Martapura	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				1.70 Km	5,100,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKU		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir- Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.48 Km	1,440,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKU		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Peninjauan (Sp. Batumarta Unit XII) - Sp. Lubuk Batang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.50 Km	1,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. OKU		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sukajadi (Baturaja) - Sp. Lengkiti	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				1.71 Km	5,130,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKU		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Martapura – Muara Dua	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Dua – Sp. Haji	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Haji – Sp. Campang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Campang - Sp. Muara Sindang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.75 Km	2,250,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Muara Sindang - Bts. Prov. Bengkulu	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Dua - Sp. Sender	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS			
- Pembangunan Drainase Muara Dua - Sp. Sender	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					1.00 Km	2,800,000,000.00				-			Kab. OKUS			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sender - Bts. Prov. Lampung	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUS			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKUT				75,999,100,000.00		32,354,600,000.00		55,876,983,470.00		58,782,011,838.00		59,325,375,388.00		53,302,966,017.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		11.45 Km	57,251,500,000.00			0.95 Km	2,520,000,000.00						Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi	
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara						0.95 Km	2,520,000,000.00									
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket						1.00 Paket	20,000,000.00						Provinsi Sumsel			
- Perkuatan Dinding Penahan Tanah di Kab. OKU Timur	Panjang Dinding Penahan Tanah yang diperkuat						0.95 Km	2,500,000,000.00									
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara		269.46 Km	2,307,850,000.00	269.46 Km	2,714,600,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara				269.46 Km	2,714,600,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00	269.46 Km	6,756,500,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				269.46 Km	2,694,600,000.00	269.46 Km	6,736,500,000.00	269.46 Km	6,736,500,000.00	269.46 Km	6,736,500,000.00	269.46 Km	6,736,500,000.00	Kab. OKUT		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		5.47 Km	16,439,750,000.00	9.83 Km	29,640,000,000.00	15.47 Km	46,600,483,470.00	17.28 Km	52,025,511,838.00	17.46 Km	52,568,875,388.00	15.45 Km	46,546,466,017.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				9.83 Km	29,640,000,000.00	15.47 Km	46,600,483,470.00	17.28 Km	52,025,511,838.00	17.46 Km	52,568,875,388.00	15.45 Km	46,546,466,017.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				7.00 Paket	140,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. OKI – Sp. Kepuh	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				2.17 Km	6,500,000,000.00	1.97 Km	5,900,483,470.00	3.78 Km	11,325,511,838.00	3.96 Km	11,868,875,388.00	1.95 Km	5,846,466,017.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Gumawang - Rasuan (Sp. Kepuh)	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.33 Km	4,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Martapura – Sp. Martapura	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.33 Km	4,000,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kurungan Nyawa - Martapura	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.00 Km	3,000,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Box Culvert Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala													Kab. OKUT			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Kepuh – Kurungan Nyawa	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.33 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan BETUNG-PETANGGAN	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				-		1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan PETANGGAN - T.J. KEMUNING - BTS. KAB. OKI	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				-		1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan GUMAWANG-PETANGGAN	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.33 Km	4,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan KURUNGAN NYAWA - GUMAWANG	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala				1.33 Km	4,000,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKUT		
- Pemeliharaan Berkala Jalan CEMPAKA - TRANS. SP 1	Panjang Jalan yang dipelihara secara berkala						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKUT		
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MUARA ENIM				53,387,748,735.00		41,064,800,000.00		44,997,000,000.00		50,997,000,000.00		50,997,000,000.00		52,497,000,000.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		4.40 Km	27,555,484,355.00			0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MUARA ENIM	Panjang Jalan yang direhabilitasi						0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00	0.05 Km	1,020,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket						1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Penanganan Longsoran Jalan Sp. Sugihwaras - Bts. Kab. Lahat	Panjang Longsoran yang Ditangani						0.05 Km	1,000,000,000.00	0.05 Km	1,000,000,000.00	0.05 Km	1,000,000,000.00	0.05 Km	1,000,000,000.00	Kab. Muara Enim		
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		309.48 Km	2,966,014,380.00	309.48 Km	3,134,800,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MUARA ENIM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				309.48 Km	3,134,800,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00	309.48 Km	7,777,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muara Enim	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				123.48 Km	1,234,800,000.00	123.48 Km	3,087,000,000.00	123.48 Km	3,087,000,000.00	123.48 Km	3,087,000,000.00	123.48 Km	3,087,000,000.00	Kab. Muara Enim		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. PALI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				186.00 Km	1,860,000,000.00	186.00 Km	4,650,000,000.00	186.00 Km	4,650,000,000.00	186.00 Km	4,650,000,000.00	186.00 Km	4,650,000,000.00	Kab. PALI		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara		7.60 Km	22,866,250,000.00	12.58 Km	37,930,000,000.00	12.00 Km	36,200,000,000.00	14.00 Km	42,200,000,000.00	14.00 Km	42,200,000,000.00	14.50 Km	43,700,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MUARA ENIM	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				12.58 Km	37,930,000,000.00	12.00 Km	36,200,000,000.00	14.00 Km	42,200,000,000.00	14.00 Km	42,200,000,000.00	14.50 Km	43,700,000,000.00			

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN																	
Organisasi Perangkat Daerah		: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan															
Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket			9.00 Paket	180,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	10.00 Paket	200,000,000.00	Provinsi Sumsel			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Sugihwaras – Bts. Kab. Lahat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			3.33 Km	10,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	Kab. MUARA ENIM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Akses Menuju Kebun Raya Sriwijaya – Sp. Lorok	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.75 Km	2,250,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. MUARA ENIM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lembak – Bts. Kab. Ogan Ilir	Panjang Jalan yang direhabilitasi			0.75 Km	2,250,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. MUARA ENIM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lembak - Modong (Bts. Kab. Pali)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.75 Km	2,250,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. MUARA ENIM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Ogan Ilir – Beringin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.65 Km	1,950,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. MUARA ENIM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Lima Pendopo (Kab. Pali) - Bts. Kab. Mura	Panjang Jalan direhabilitasi					2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	Kab. PALI			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Raja - Modong (Bts. Kab. Muara Enim)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			1.80 Km	5,400,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. PALI			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Air Itam – Sp. Talang Bulang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			1.55 Km	4,650,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. PALI			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muba- Sp. Air Itam	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			2.50 Km	7,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. PALI			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Belimbing – Pendopo (PALI)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.50 Km	1,500,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. PALI			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN LAHAT				79,161,700,000.00		34,141,300,000.00		57,343,250,000.00		52,823,250,000.00		52,823,250,000.00		52,823,250,000.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		12.40 Km	62,053,000,000.00	0.06 Km	8,040,000,000.00	0.04 Km	4,520,000,000.00						Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi	
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. LAHAT	Panjang Jalan yang direhabilitasi				0.06 Km	8,040,000,000.00	0.04 Km	4,520,000,000.00									
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket			2.00 Paket	40,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00							Provinsi Sumsel			
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah Ruas Jalan Muara Siban - Sp. Embacang Kec. Gumay Ulu	Panjang Dinding Penahan Tanah yang dibangun					0.04 Km	4,500,000,000.00							Kota PAGARALAM			
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah STA 26 +400 (R) Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin	Panjang Dinding Penahan Tanah yang dibangun			0.03 Km	4,000,000,000.00									Kab. LAHAT			
- Pembangunan Dinding Penahan Tanah Tebing Tinggi - Pendopo	Panjang Dinding Penahan Tanah yang dibangun			0.03 Km	4,000,000,000.00									Kab. LAHAT			
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		244.13 Km	2,242,450,000.00	244.13 Km	2,501,300,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. LAHAT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				244.13 Km	2,501,300,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00	244.13 Km	6,163,250,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket			3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	Provinsi Sumsel			
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Pagaram	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			14.10 Km	141,000,000.00	14.10 Km	352,500,000.00	14.10 Km	352,500,000.00	14.10 Km	352,500,000.00	14.10 Km	352,500,000.00	Kota PAGARALAM			
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Lahat	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			83.17 Km	831,700,000.00	83.17 Km	2,079,250,000.00	83.17 Km	2,079,250,000.00	83.17 Km	2,079,250,000.00	83.17 Km	2,079,250,000.00	Kab. LAHAT			
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Empat Lawang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin			146.86 Km	1,468,600,000.00	146.86 Km	3,671,500,000.00	146.86 Km	3,671,500,000.00	146.86 Km	3,671,500,000.00	146.86 Km	3,671,500,000.00	Kab. EMPAT LAWANG			
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		4.93 Km	14,866,250,000.00	7.83 Km	23,600,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. LAHAT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				7.83 Km	23,600,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00	15.50 Km	46,660,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket			5.00 Paket	100,000,000.00	8.00 Paket	160,000,000.00	8.00 Paket	160,000,000.00	8.00 Paket	160,000,000.00	8.00 Paket	160,000,000.00	Provinsi Sumsel			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Keban Agung - Sp. Tj.Aro (Pagaram)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.67 Km	2,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kota PAGARALAM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tj. Cermin - Perandonan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.67 Km	2,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kota PAGARALAM			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muara Enim - Sp. Air Dingin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			2.00 Km	6,000,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. LAHAT			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Muara Siban - Sp. Embacang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. LAHAT			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tebing Tinggi – Tanjung Raya	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			2.50 Km	7,500,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	3.00 Km	9,000,000,000.00	Kab. EMPAT LAWANG			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tebing Tinggi – Pendopo (Empat Lawang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. EMPAT LAWANG			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pagaram - Tanjung Raya	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	Kab. EMPAT LAWANG			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Raya - Bts. Prov. Bengkulu	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	Kab. EMPAT LAWANG			
Halaman 7 dari 21																	

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN OKI				100,027,600,000.00		40,013,026,815.00		54,431,500,000.00		55,181,500,000.00		55,181,500,000.00		55,181,500,000.00			
Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang direhabilitasi		9.50 Km	47,579,500,000.00											Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKI	Panjang Jalan yang direhabilitasi																
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		306.86 Km	2,895,100,000.00	306.86 Km	3,108,600,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				306.86 Km	3,108,600,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00	306.86 Km	7,711,500,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. OKI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				102.18 Km	1,021,800,000.00	102.18 Km	2,554,500,000.00	102.18 Km	2,554,500,000.00	102.18 Km	2,554,500,000.00	102.18 Km	2,554,500,000.00	Kab. OKI		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Ol	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				204.68 Km	2,046,800,000.00	204.68 Km	5,117,000,000.00	204.68 Km	5,117,000,000.00	204.68 Km	5,117,000,000.00	204.68 Km	5,117,000,000.00	Kab. Ol		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		16.50 Km	49,553,000,000.00	12.25 Km	36,904,426,815.00	15.50 Km	46,720,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. OKI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				12.25 Km	36,904,426,815.00	15.50 Km	46,720,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00	15.75 Km	47,470,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				7.00 Paket	140,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	11.00 Paket	220,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan KTM. Rambutan - Sp. Lorok	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Meranjat - Bts. Kab. Muara Enim	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Trans Sp. I - Sp. Tanah Abang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Tambang Rambang – Bts. Kab. OKU	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				1.00 Km	3,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Tanjung Raja – Sp. Tambang Rambang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				4.70 Km	14,105,876,570.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	2.50 Km	7,500,000,000.00	Kab. Ol		
Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Opi - Babatan Saudagar - Srijabo	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				2.40 Km	7,208,550,245.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Muara Enim – Payaraman	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.40 Km	1,200,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Ol		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lubuk Seburuk - Sumbu Sari - Mataram	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. OKI		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Dabuk Rejo – Bts. Kab. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.70 Km	2,100,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.25 Km	3,750,000,000.00	1.25 Km	3,750,000,000.00	1.25 Km	3,750,000,000.00	Kab. OKI		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Penyandingan – Bts. Kab. OKUT	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				2.35 Km	7,050,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. OKI		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kab. Banyuasin – Celikah (Kayu Agung)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.70 Km	2,100,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. OKI		
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KOTA PALEMBANG				97,247,520,000.00		42,160,000,000.00		111,071,925,000.00		110,521,925,000.00		109,681,925,000.00		109,681,925,000.00			
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		74.08 Km	1,149,020,000.00	74.08 Km	1,510,000,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KOTA PALEMBANG	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				74.08 Km	1,510,000,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00	74.08 Km	1,861,925,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Palembang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				74.08 Km	1,500,000,000.00	74.08 Km	1,851,925,000.00	74.08 Km	1,851,925,000.00	74.08 Km	1,851,925,000.00	74.08 Km	1,851,925,000.00	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		17.66 Km	96,098,500,000.00	5.91 Km	40,650,000,000.00	16.49 Km	109,210,000,000.00	15.90 Km	108,660,000,000.00	15.76 Km	107,820,000,000.00	15.76 Km	107,820,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KOTA PALEMBANG	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				5.91 Km	40,650,000,000.00	16.49 Km	109,210,000,000.00	15.90 Km	108,660,000,000.00	15.76 Km	107,820,000,000.00	15.76 Km	107,820,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				19.00 Paket	190,000,000.00	27.00 Paket	270,000,000.00	26.00 Paket	260,000,000.00	26.00 Paket	260,000,000.00	26.00 Paket	260,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkar Mesjid Agung (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.36 Km	2,160,000,000.00	0.23 Km	1,380,000,000.00	0.36 Km	2,160,000,000.00	0.36 Km	2,160,000,000.00	0.36 Km	2,160,000,000.00	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan Lingkar Mesjid Agung (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						0.36 Km	2,160,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Kota Palembang		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Merdeka (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.30 Km	1,800,000,000.00	-	-	0.30 Km	1,800,000,000.00	0.30 Km	1,800,000,000.00	0.30 Km	1,800,000,000.00	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan Merdeka (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						0.50 Km	3,000,000,000.00	-	-	-	-	-	-	Kota Palembang		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kol. Atmo (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.35 Km	2,100,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang		
Halaman 8 dari 21																	

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pemeliharaan Berkala JLN. BRIGJEN. HM. DHANNY EFFENDY (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.20 Km	1,200,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan KOL. AHMAD BADARUDDIN-JLN. LETKOL. ISKANDAR (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	Kota Palembang			
Penataan Trotoar Jalan PSW. SUBEKTI (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.20 Km	1,200,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan Diponegoro (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.28 Km	1,700,000,000.00		-		-		-		-	Kota Palembang			
Penataan Trotoar Jalan Diponegoro (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan Diponegoro (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.30 Km	1,800,000,000.00	0.30 Km	1,800,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Kapten A. Rivai (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.25 Km	1,500,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00		-	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan Kapten A. Rivai (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.25 Km	1,500,000,000.00		-		-	0.30 Km	1,800,000,000.00	0.30 Km	1,800,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemasangan Saluran WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar WALIKOTA H. HUSNI (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan M. ISA (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.20 Km	1,200,000,000.00		-	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar M. ISA (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Angkatan 45 (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.25 Km	1,500,000,000.00		-	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan Angkatan 45 (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sultan M. Mansyur (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.25 Km	1,500,000,000.00		-	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Perbaikan Saluran Sultan M. Mansyur (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Srijaya Negara (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala JLN. AKBP CEK AGUS (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	0.20 Km	1,200,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pangeran Ratu - Pasar Induk - Sp. Jl. Pendidikan (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.75 Km	4,500,000,000.00		-		-	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemasangan Saluran Pangeran Ratu - Pasar Induk - Sp. Jl. Pendidikan (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00	0.74 Km	4,440,000,000.00		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala dan Penataan Trotoar Jalan DI. Panjaitan (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					1.00 Km	6,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan DI. Panjaitan (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	0.60 Km	3,600,000,000.00	0.60 Km	3,600,000,000.00	0.60 Km	3,600,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Box Culvert Jalan MP. Mangkunegara (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan MP. Mangkunegara (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.33 Km	2,000,000,000.00		-		-		-		-				
- Pemeliharaan Berkala Jalan Mayor Zen (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.33 Km	2,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan PANGERAN AYIN (KOTA PALEMBANG) - BTS. BANYUASIN	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-		-	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemasangan Saluran Jalan PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					1.00 Km	6,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang			
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Penataan Trotoar Jalan PENDIDIKAN - JLN. LINGKAR SELATAN (PALEMBANG)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						-	1.00 Km	6,000,000,000.00		-		-	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan KAPT. ABDULLAH - JLN. ROBANI KADIR	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lettu Karim Kadir (Gandus) - Bts. Kab. Banyuasin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.35 Km	2,100,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang			

Halaman 9 dari 21

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Noerdin Pandji (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.58 Km	3,500,000,000.00		-	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Pemasangan Saluran Jalan Noerdin Pandji (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	6,000,000,000.00	-		-		-		Kota Palembang		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Taqwa Mata Merah (Palembang) - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.33 Km	2,000,000,000.00		-		-	1.00 Km	6,000,000,000.00	1.00 Km	6,000,000,000.00	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Triple Box Culvert Jalan Taqwa Mata Merah (Palembang) - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	6,000,000,000.00	-		-		-		Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan dan Double Box Culvert Jalan Taqwa Mata Merah (Palembang) - Merah Mata (Bts. Kab. Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)							-	1.00 Km	6,000,000,000.00		-		-	Kota Palembang		
- Pemeliharaan Berkala dan Penataan Trotoar Jalan Adi Sucipto - Bts. Kab. Banyuasin (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.33 Km	2,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00		-		-		-	Kota Palembang		
Pemeliharaan Berkala Jalan Adi Sucipto - Bts. Kab. Banyuasin (Palembang)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)							-	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	0.50 Km	3,000,000,000.00	Kota Palembang		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Lingkungan Kantor	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				5.00 Ktr	5,000,000,000.00	5.00 Kantor	10,000,000,000.00	5.00 Kantor	10,000,000,000.00	5.00 Kantor	10,000,000,000.00	5.00 Kantor	10,000,000,000.00	Kota Palembang		
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MUBA				19,537,950,000.00		21,185,200,000.00		37,043,000,000.00		37,043,000,000.00		37,043,000,000.00		33,563,278,123.00			
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		94.52 Km	971,700,000.00	94.52 Km	985,200,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MUBA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				94.52 Km	985,200,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00	94.52 Km	2,403,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	2.00 Paket	40,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Banyuasin	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				53.68 Km	536,800,000.00	53.68 Km	1,342,000,000.00	53.68 Km	1,342,000,000.00	53.68 Km	1,342,000,000.00	53.68 Km	1,342,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Muba	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				40.84 Km	408,400,000.00	40.84 Km	1,021,000,000.00	40.84 Km	1,021,000,000.00	40.84 Km	1,021,000,000.00	40.84 Km	1,021,000,000.00	Kab. MUBA		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		6.17 Km	18,566,250,000.00	6.70 Km	20,200,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	31,160,278,123.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MUBA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				6.70 Km	20,200,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	34,640,000,000.00	11.50 Km	31,160,278,123.00			
Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				5.00 Paket	100,000,000.00	7.00 Paket	140,000,000.00	7.00 Paket	140,000,000.00	7.00 Paket	140,000,000.00	7.00 Paket	140,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kota Palembang - Kenten Laut (Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Jln. Talang Keramat (Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.57 Km	1,700,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kota Palembang - Sukajadi	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.73 Km	2,200,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Bts. Kota Palembang – Sukomoro (Banyuasin)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.40 Km	1,200,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan PLAJU - SP. SUNGAI PINANG - BTS. KAB OKI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				1.67 Km	5,000,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan TPI Sungsang	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)						1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	1.00 Km	3,000,000,000.00	Kab. Banyuasin		
- Pemeliharaan Berkala Jalan SEKAYU - BTS. KAB. PALI	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				3.33 km	10,000,000,000.00	5.00 Km	15,000,000,000.00	5.00 Km	15,000,000,000.00	5.00 Km	15,000,000,000.00	5.00 Km	11,520,278,123.00	Kab. MUBA		
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KABUPATEN MURA				15,062,000,000.00		19,139,250,000.00		49,083,125,000.00		49,083,125,000.00		52,083,125,000.00		53,583,125,000.00			
Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		186.93 Km	1,809,000,000.00	186.93 Km	1,929,250,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MURA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				186.93 Km	1,929,250,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00	186.93 Km	4,733,125,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	3.00 Paket	60,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. Musi Rawas	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				113.45 Km	1,134,450,000.00	113.45 Km	2,836,125,000.00	113.45 Km	2,836,125,000.00	113.45 Km	2,836,125,000.00	113.45 Km	2,836,125,000.00	Kab. MURA		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kab. MURATARA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				59.86 Km	598,600,000.00	59.86 Km	1,496,500,000.00	59.86 Km	1,496,500,000.00	59.86 Km	1,496,500,000.00	59.86 Km	1,496,500,000.00	Kab. MURATARA		
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi di Kota Lubuk Linggau	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin				13.62 Km	136,200,000.00	13.62 Km	340,500,000.00	13.62 Km	340,500,000.00	13.62 Km	340,500,000.00	13.62 Km	340,500,000.00	Kota Lubuk Linggau		
Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)		1.80 Km	5,426,500,000.00	5.70 Km	17,210,000,000.00	14.75 Km	44,350,000,000.00	14.75 Km	44,350,000,000.00	15.75 Km	47,350,000,000.00	16.25 Km	48,850,000,000.00	Provinsi Sumsel	Infrastruktur Tuntas Merata	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MURA	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				5.70 Km	17,210,000,000.00	14.75 Km	44,350,000,000.00	14.75 Km	44,350,000,000.00	15.75 Km	47,350,000,000.00	16.25 Km	48,850,000,000.00			
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				5.00 Paket	100,000,000.00	5.00 Paket	100,000,000.00	5.00 Paket	100,000,000.00	5.00 Paket	100,000,000.00	5.00 Paket	100,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. 9 Bangun Jaya - Sp. Kulim (Bts. PALI)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)				0.83 Km	2,500,000,000.00									Kab. MURA		

Halaman 10 dari 21

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Bahu Jalan Sp. 9 Bangun Jaya - Sp. Kulim (Bts. PALI)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)					5.00 Km	15,000,000,000.00	5.00 Km	15,000,000,000.00	6.00 Km	18,000,000,000.00	6.00 Km	18,000,000,000.00	Kab. MURA			
- Pemeliharaan Berkala Jalan dan Bahu Jalan SP. SEMAMBANG - SP. 9 BANGUN JAYA (MUSIRAWAS)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			2.00 Km	6,000,000,000.00	2.25 Km	6,750,000,000.00	2.25 Km	6,750,000,000.00	2.25 Km	6,750,000,000.00	2.25 Km	6,750,000,000.00	Kab. MURA			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Sp. Periuk – Tugu Mulyo – Terawas	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			1.47 Km	4,410,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	2.00 Km	6,000,000,000.00	Kab. MURA			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Terawas – Tabatinggi – Maur	Panjang Jalan yang Dipelihara			0.70 Km	2,100,000,000.00	4.00 Km	12,000,000,000.00	4.00 Km	12,000,000,000.00	4.00 Km	12,000,000,000.00	4.50 Km	13,500,000,000.00	Kab. MURATARA			
- Pemeliharaan Berkala Jalan Handayani (Kota Lubuk Linggau) - Tugumulyo (Kab. Musi Rawas)	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala (Km)			0.70 Km	2,100,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	1.50 Km	4,500,000,000.00	Kota Lubuk Linggau			
Pelebaran Jalan Menuju Standar	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar		1.30 Km	7,826,500,000.00													
UPTD JALAN DAN JEMBATAN KAB. MURA	Panjang Jalan yang Dilebarkan Menuju Standar																
PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang	62.50	65.00	4,533,839,250.00	67.50	6,080,000,000.00	70.00	7,973,000,000.00	72.50	8,858,275,000.00	75.00	10,435,043,275.00	77.50	14,376,436,835.00	Provinsi Sumsel		
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Provinsi		100%		100%		100%		100%		100%		100%				
Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi	Persentase Dokumen Penetapan RTR yang ditetapkan		100%	1,258,350,250.00	100%	1,430,000,000.00	100%	1,050,000,000.00	100%	1,150,000,000.00	100%	1,250,000,000.00	100%	2,650,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penetapan Kebijakan Dalam Rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Pergub selain RTRW Provinsi				2.00 Dokumen	390,000,000.00	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	- Dokumen	-	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah Publikasi informasi Penataan Ruang				1.00 Publikasi	340,000,000.00	1.00 Publikasi	500,000,000.00	1 Publikasi	550,000,000.00	1 Publikasi	600,000,000.00	1.00 Publikasi	600,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penetapan RTRW Provinsi	Tersedianya Perda RTRW Provinsi				- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	1.00 Perda	350,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen administrasi dan penyempurnaan dokumen hasil evaluasi dan masukan padaforumlintassektor dalam rangka penerbitan persetujuan substansi				- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	1.00 Surat	500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Evaluasi RTRW Provinsi	Terpenuhinya dokumen persyaratan untuk mendapatkan Keputusan Menteri Dalam Negeri hasil evaluasi				- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	1.00 Dokumen	500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan dan Pedoman Bidang Penataan Ruang	Jumlah Pemangku Kepentingan yang mengikuti kegiatan sosialisasi				100.00 orang	700,000,000.00	100.00 orang	550,000,000.00	100 orang	600,000,000.00	100 orang	650,000,000.00	100.00 orang	700,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Rencana Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang yang terlaksana		100%	1,477,269,000.00	100%	1,800,000,000.00	100%	2,300,000,000.00	100%	2,400,000,000.00	100%	2,850,000,000.00	100%	5,150,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Laporan Peningkatan Pemahaman dan Tanggung Jawab Masyarakat				1.00 Laporan	350,000,000.00	1.00 Laporan	500,000,000.00	1 Laporan	550,000,000.00	1 Laporan	550,000,000.00	1.00 Laporan	550,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan				10.00 orang	150,000,000.00	10.00 orang	200,000,000.00	10 orang	250,000,000.00	10 orang	250,000,000.00	10.00 orang	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	225,000,000.00	1.00 Dokumen	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyusunan RTRW Provinsi	Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan Pedoman				- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	1.00 Dokumen	1,200,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pemberian Bimbingan,Supervisdan Konsultasi Penyusunan Rencana Tata Ruang kepada Kabupaten/Kota	Terlaksananya Bimbingan,Supervisi dan Konsultasi Penyusunan RTRW dan RDTR kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				1.00 Laporan	100,000,000.00	1.00 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	225,000,000.00	1.00 Laporan	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Kabupaten/Kota	Tersedianya Keputusan Gubernur Hasil Evaluasi Ranperda RTRW Kab/Kota sesuai dengan ketentuan waktu yaitu 15 hari				7.00 Dokumen	350,000,000.00	2.00 Dokumen	250,000,000.00	2 Dokumen	200,000,000.00	2 Dokumen	250,000,000.00	2.00 Dokumen	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyusunan Peta Dasar	Tersedianya orthorektifikasi citra dari raw citra ke format ECW dan tersedianya data SHP Peta Dasar				- -	-	- -	-	- -	-	- -	-	1.00 Peta	1,000,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi Fasilitasi Pembahasan RTRW Kab/Kota	Jumlah Berita Acara pembahasan RTRW Kab/Kota				3.00 Berita Acara	400,000,000.00	3.00 Berita Acara	550,000,000.00	2 Berita Acara	550,000,000.00	2 Berita Acara	400,000,000.00	2.00 Berita Acara	400,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Halaman 11 dari 21																	

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
Koordinasi Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Surat Hasil Fasilitas Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota				5.00 Dokumen	250,000,000.00	5.00 Dokumen	400,000,000.00	5 Dokumen	450,000,000.00	5 Dokumen	450,000,000.00	5.00 Dokumen	450,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi				- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 Dokumen	500,000,000.00	1.00 Dokumen	550,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Prrovinsi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah yang terlaksana		100%	1,124,950,000.00	100%	1,290,000,000.00	100%	2,050,000,000.00	100%	2,100,000,000.00	100%	2,450,000,000.00	100%	2,450,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha	Jumlah Layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan Ketentuan Waktu yang berlaku				8.00 Layanan	65,000,000.00	8.00 Layanan	200,000,000.00	8 Layanan	200,000,000.00	8 Layanan	250,000,000.00	8.00 Layanan	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Laporan Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				1.00 Laporan	600,000,000.00	1.00 Laporan	700,000,000.00	1 Laporan	700,000,000.00	1 Laporan	800,000,000.00	1.00 Laporan	800,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Non Berusaha	Jumlah Layanan KKPR sesuai dengan Ketentuan waktu yang berlaku				- -	- -	7.00 Layanan	150,000,000.00	7 Layanan	150,000,000.00	7 Layanan	200,000,000.00	7.00 Layanan	200,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang	Jumlah Sistem Informasi dan Komunikasi Penataan Ruang				1.00 Dokumen	250,000,000.00	1.00 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	550,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1.00 Dokumen	600,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang				1.00 Dokumen	375,000,000.00	1.00 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1.00 Dokumen	600,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi yag terlaksana		100%	673,270,000.00	100%	1,560,000,000.00	100%	2,573,000,000.00	100%	3,208,275,000.00	100%	3,885,043,275.00	100%	4,126,436,835.00	Provinsi Sumsel		
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				1.00 Kasus	100,000,000.00	1.00 Kasus	150,000,000.00	1 Kasus	200,000,000.00	1 Kasus	219,615,000.00	1.00 Kasus	226,436,835.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1.00 Dokumen	350,000,000.00	1.00 Dokumen	500,000,000.00	1 Dokumen	550,000,000.00	1 Dokumen	600,000,000.00	1.00 Dokumen	650,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah Kasus Indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang				2.00 Kasus	150,000,000.00	2.00 Kasus	150,000,000.00	2 Kasus	181,500,000.00	2 Kasus	202.993,275.00	2.00 Kasus	225,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1.00 Dokumen	150,000,000.00	1.00 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	181,500,000.00	1 Dokumen	219,615,000.00	1.00 Dokumen	225,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengawasan Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				1.00 Dokumen	200,000,000.00	1.00 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	263,775,000.00	1 Dokumen	292,820,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Pelanggaran Pemanfaatan Ruang dalam RTR	Jumlah Kasus yang dikenakan sanksi administratif				2.00 Kasus	80,000,000.00	2.00 Kasus	150,000,000.00	2 Kasus	181,500,000.00	2 Kasus	200,000,000.00	2.00 Kasus	200,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang				1.00 Laporan	150,000,000.00	1.00 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1 Laporan	250,000,000.00	1.00 Laporan	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Terlaksananya Kegiatan yang Sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang				- -	- -	1.00 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	150,000,000.00	1 Laporan	200,000,000.00	1.00 Laporan	200,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah Dokumen Tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR				1.00 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	323,000,000.00	1 Dokumen	350,000,000.00	1 Dokumen	500,000,000.00	1.00 Dokumen	500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang				- -	- -	1.00 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	200,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengawasan Standar Pelayanan Bidang Penataan Ruang	Dokumen Hasil Penilaian Kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat				- -	- -	1.00 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	400,000,000.00	1.00 Dokumen	450,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau Penyataan Mandiri Pelaku UMK	Dokumen Tekstual dan spasial hasil penilaian pelaksanaan kesesuaian Kegiatan pemanfaatan ruang				1.00 Dokumen	80,000,000.00	1.00 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	250,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	350,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pemberian insentif dan/ataudisinsentif nonfiskal	Terlaksananya Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal						1.00 Surat BA	150,000,000.00	1 Surat BA	200,000,000.00	1 Surat BA	250,000,000.00	1.00 Surat BA	250,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah	100.00%	100%	70,521,909,761.00	100%	85,703,632,082.00	100%	91,301,231,275.00	100%	84,216,207,275.00	100%	80,687,183,275.00	100%	83,118,159,275.00	Provinsi Sumsel		
DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN				67,714,334,761.00		77,199,632,082.00		75,745,231,275.00		77,070,207,275.00		73,401,183,275.00		75,762,159,275.00			
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan Penganggaran Evaluasi yang tersusun		100%	976,891,566.00	100%	1,220,000,000.00	100%	1,220,000,000.00	100%	1,220,000,000.00	100%	1,220,000,000.00	100%	1,230,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		4 Dokumen	538,821,566.00	3.00 Dokumen	745,000,000.00	4.00 Dokumen	745,000,000.00	3 Dokumen	745,000,000.00	3 Dokumen	745,000,000.00	4.00 Dokumen	755,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyusunan Renja OPD	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	2.00 Dokumen	30,000,000.00	Palembang		
- Penyusunan Renstra Perubahan	Jumlah dokumen yang disusun						1.00 Dokumen	10,000,000.00									
- Pelaksanaan Rapat Teknis OPD	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	205,000,000.00	1.00 Dokumen	205,000,000.00	1 Dokumen	205,000,000.00	1 Dokumen	205,000,000.00	1.00 Dokumen	205,000,000.00	Palembang		
- Koordinasi dan fasilitasi Bidang Jalan	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	520,000,000.00	1.00 Dokumen	510,000,000.00	1 Dokumen	520,000,000.00	1 Dokumen	520,000,000.00	1.00 Dokumen	520,000,000.00	Palembang		
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		1 Dokumen	16,500,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		1 Dokumen	21,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		1 Dokumen	16,500,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD		1 Dokumen	21,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1 Dokumen	20,000,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		1 Laporan	174,320,000.00	1.00 Laporan	110,000,000.00	1.00 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1 Laporan	100,000,000.00	1.00 Laporan	100,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2 Dokumen	188,750,000.00	2.00 Laporan	285,000,000.00	2.00 Laporan	275,000,000.00	2 Laporan	275,000,000.00	2 Laporan	275,000,000.00	2.00 Laporan	275,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pendampingan Kegiatan OPD	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	270,000,000.00	1.00 Dokumen	260,000,000.00	1 Dokumen	260,000,000.00	1 Dokumen	260,000,000.00	1.00 Dokumen	260,000,000.00	Palembang		
- Penyusunan Dokumen SAKIP OPD	Jumlah dokumen yang disusun				1.00 Dokumen	15,000,000.00	1.00 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1 Dokumen	15,000,000.00	1.00 Dokumen	15,000,000.00	Palembang		
Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral DaerahTerlaksananya Pengumpulan	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)						1.00 Data	10,000,000.00	1.00 Data	10,000,000.00	1.00 Data	10,000,000.00	1.00 Data	10,000,000.00	Palembang	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)						1.00 Dokumen	10,000,000.00	1.00 Dokumen	10,000,000.00	1.00 Dokumen	10,000,000.00	1.00 Dokumen	10,000,000.00	Palembang	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Administrasi Keuangan yang tersusun		100%	44,223,135,195.00	100%	46,672,154,400.00	100%	49,309,459,275.00	100%	49,309,459,275.00	100%	49,309,459,275.00	100%	49,309,459,275.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		261 Orang	37,528,708,000.00	332.00 Orang/Bulan	42,595,572,000.00	332.00 Orang/Bulan	42,595,572,000.00	332.00 Orang/Bulan	42,595,572,000.00	332.00 Orang/Bulan	42,595,572,000.00	332.00 Orang/Bulan	42,595,572,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		12 dokumen	5,581,736,875.00	12.00 Dokumen	2,694,432,000.00	12.00 dokumen	5,581,736,875.00	12 dokumen	5,581,736,875.00	12 dokumen	5,581,736,875.00	12.00 dokumen	5,581,736,875.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		1 Dokumen	998,250,000.00	1.00 Dokumen	1,250,000,000.00	1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000,000.00	1 Dokumen	1,000,000,000.00	1.00 Dokumen	1,000,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		1 dokumen	16,250,000.00	1.00 Dokumen	20,000,000.00	1.00 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1 dokumen	20,000,000.00	1.00 dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 dokumen	57,190,320.00	1.00 Laporan	62,150,400.00	1.00 Laporan	62,150,400.00	1 Laporan	62,150,400.00	1 Laporan	62,150,400.00	1.00 Laporan	62,150,400.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan		2 dokumen	16,250,000.00	2.00 Dokumen	20,000,000.00	2.00 dokumen	20,000,000.00	2 dokumen	20,000,000.00	2 dokumen	20,000,000.00	2.00 dokumen	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN																	
Organisasi Perangkat Daerah		: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan															
Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semeste ran SKPD		17 dokumen	16,500,000.00	17.00 Laporan	20,000,000.00	17.00 Laporan	20,000,000.00	17 Laporan	20,000,000.00	17 Laporan	20,000,000.00	17.00 Laporan	20,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 dokumen	8,250,000.00	1.00 dokumen	10,000,000.00	1.00 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1 dokumen	10,000,000.00	1.00 dokumen	10,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Pesentase BMD yang dikelola		100%	2,234,250,000.00	100%	3,005,600,000.00	100%	2,741,982,000.00	100%	2,767,608,000.00	100%	2,793,234,000.00	100%	2,818,860,000.00	Provinsi Sumsel		
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD		1 Dokumen	1,898,250,000.00	1.00 Dokumen	2,500,000,000.00	1.00 Dokumen	2,140,000,000.00	1 Dokumen	2,160,000,000.00	1 Dokumen	2,180,000,000.00	1.00 Dokumen	2,200,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilalan Barang Milik Daerah SKPD		1 Laporan	247,000,000.00	1.00 Laporan	270,000,000.00	1.00 Laporan	374,500,000.00	1 Laporan	378,000,000.00	1 Laporan	381,500,000.00	1.00 Laporan	385,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	72,500,000.00	1.00 Laporan	185,000,000.00	1.00 Laporan	107,000,000.00	1 Laporan	108,000,000.00	1 Laporan	109,000,000.00	1.00 Laporan	110,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	16,500,000.00	1.00 Laporan	50,600,000.00	1.00 Laporan	120,482,000.00	1 Laporan	121,608,000.00	1 Laporan	122,734,000.00	1.00 Laporan	123,860,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang difasilitasi		100%	501,650,000.00	100%	765,000,000.00	100%	1,045,000,000.00	100%	1,045,000,000.00	100%	1,045,000,000.00	100%	1,045,000,000.00	Provinsi Sumsel		Pertumbuhan Ekonomi
Peningkatan sarana dan prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		12 Unit	62,200,000.00	12.00 Unit	95,000,000.00	12.00 Unit	95,000,000.00	12 Unit	95,000,000.00	12 Unit	95,000,000.00	12.00 Unit	95,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		1 Dokumen	81,500,000.00	1.00 Dokumen	120,000,000.00	1.00 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1.00 Dokumen	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Tahun	300,000,000.00	81.00 Orang	450,000,000.00	1.00 Orang	650,000,000.00	1 Orang	650,000,000.00	1 Orang	650,000,000.00	1.00 Orang	650,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan				6.00 Orang	150,000,000.00	6.00 Orang	150,000,000.00	6.00 Orang	150,000,000.00	6.00 Orang	150,000,000.00	6.00 Orang	150,000,000.00	Palembang		
- Bimtek / Pelatihan peningkatan SDM Teknis	jumlah pelatihan yang dilaksanakan				75.00 Orang	300,000,000.00	75.00 Orang	500,000,000.00	75.00 Orang	500,000,000.00	75.00 Orang	500,000,000.00	75.00 Orang	500,000,000.00	Palembang		
Bimbingan Teknis Implementasi Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		30 orang	57,950,000.00	30.00 orang	100,000,000.00	30.00 orang	150,000,000.00	30 orang	150,000,000.00	30 orang	150,000,000.00	30.00 orang	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana		100%	1,719,808,000.00	100%	1,758,300,000.00	100%	2,080,340,000.00	100%	2,080,340,000.00	100%	2,080,340,000.00	100%	2,080,340,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		12 Paket	88,400,000.00	12.00 Paket	89,250,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		12 Paket	237,096,000.00	1.00 Paket	134,370,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor Dinas	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00 Paket	134,370,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		12 Paket	303,590,000.00	12.00 Paket	197,340,000.00	12.00 Paket	215,000,000.00	12 Paket	215,000,000.00	12 Paket	215,000,000.00	12.00 Paket	215,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pengisian Tabung Pemadam kebakaran	Jumlah Tabung Pemadam Kebakaran				12.00 Bulan	15,000,000.00	12.00 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	15,000,000.00	12.00 Bulan	15,000,000.00	Palembang		
- Pengadaan bahan kebersihan kantor Dinas	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				12.00 Bulan	182,340,000.00	12.00 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	12 Bulan	200,000,000.00	12.00 Bulan	200,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		12 Paket	100,000,000.00	12.00 Paket	100,000,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan Minuman yang tersedia				12.00 Paket	100,000,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12 Paket	150,000,000.00	12.00 Paket	150,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		12 Paket	170,000,000.00	1.00 Paket	92,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Dinas	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	92,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1 Paket	150,000,000.00	1.00 Paket	150,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		12 Dokumen	55,000,000.00	12.00 Dokumen	55,000,000.00	12.00 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	12 Dokumen	25,000,000.00	12.00 Dokumen	25,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		12 Laporan	370,950,000.00	12.00 Laporan	600,000,000.00	12.00 Laporan	700,000,000.00	12 Laporan	700,000,000.00	12 Laporan	700,000,000.00	12.00 Laporan	700,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		1 Dokumen	111,772,000.00	1.00 Dokumen	190,340,000.00	1.00 Dokumen	190,340,000.00	1 Dokumen	190,340,000.00	1 Dokumen	190,340,000.00	1.00 Dokumen	190,340,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi

Halaman 14 dari 21

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN																		
Organisasi Perangkat Daerah		: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan																
Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET		
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN	
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)				
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1 Dokumen	283,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Dokumentasi dan publikasi penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel	Jumlah Dokumentasi dan publikasi penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Provinsi Sumsel				1.00 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1 Dokumen	300,000,000.00	1.00 Dokumen	300,000,000.00	Provinsi Sumsel			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase target pengadaan yang terlaksana		100%	4,937,800,000.00	100%	6,940,000,000.00	100%	6,633,700,000.00	100%	7,900,800,000.00	100%	4,173,900,000.00	100%	6,467,000,000.00	Provinsi Sumsel			
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						3.00 Unit	1,491,000,000.00	3 Unit	1,494,000,000.00	2 Unit	996,000,000.00	2.00 Unit	996,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1.00 Unit	400,000,000.00	1.00 Unit	400,000,000.00	1 Unit	400,000,000.00	1 Unit	400,000,000.00	1.00 Unit	400,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		2 Unit	4,937,800,000.00	2.00 Unit	6,540,000,000.00	2.00 Unit	4,742,700,000.00	2 Unit	6,006,800,000.00	1 Unit	2,777,900,000.00	1.00 Unit	5,071,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Pengadaan Alat-alat kebinamargaan	Jumlah pengadaan peralatan				1.00 Unit	4,970,000,000.00	2.00 Unit	3,020,000,000.00	2 Unit	4,268,000,000.00	1 Unit	1,023,000,000.00	1.00 Unit	3,300,000,000.00	Palembang			
- Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah pengadaan peralatan				1.00 set	1,570,000,000.00	1.00 set	1,722,700,000.00	1 set	1,738,800,000.00	1 set	1,754,900,000.00	1.00 set	1,771,000,000.00	Palembang			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi		100%	3,944,700,000.00	100%	4,684,000,000.00	100%	4,684,000,000.00	100%	4,684,000,000.00	100%	4,684,000,000.00	100%	4,684,000,000.00	Provinsi Sumsel			
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		12 Laporan	15,000,000.00	12.00 Laporan	15,000,000.00	12.00 Laporan	15,000,000.00	12 Laporan	15,000,000.00	12 Laporan	15,000,000.00	12.00 Laporan	15,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		11 Laporan	1,640,000,000.00	1.00 Laporan	1,385,000,000.00	1.00 Laporan	1,385,000,000.00	1 Laporan	1,385,000,000.00	1 Laporan	1,385,000,000.00	1.00 Laporan	1,385,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1.00 Laporan	1,385,000,000.00	1.00 Laporan	1,385,000,000.00	1 Laporan	1,385,000,000.00	1 Laporan	1,385,000,000.00	1.00 Laporan	1,385,000,000.00	Palembang			
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		5 Laporan	2,289,700,000.00	5.00 Laporan	3,284,000,000.00	5.00 Laporan	3,284,000,000.00	5 Laporan	3,284,000,000.00	5 Laporan	3,284,000,000.00	5.00 Laporan	3,284,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Penyediaan Jasa Tutor SKJ	Jumlah tenaga Tutor SKJ				88.00 OK	26,400,000.00	88.00 OK	26,400,000.00	88 OK	26,400,000.00	88 OK	26,400,000.00	88.00 OK	26,400,000.00	Palembang			
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah gedung kantor yang dibersihkan (Unit)				29.00 OK	1,322,400,000.00	29.00 OK	1,322,400,000.00	29 OK	1,322,400,000.00	29 OK	1,322,400,000.00	29.00 OK	1,322,400,000.00	Palembang			
- Penyediaan Jasa Jaminan Milik Daerah	Jumlah Kendaraan yang diasuransikan (unit)				1.00 dokumen	350,000,000.00	1.00 dokumen	350,000,000.00	1 dokumen	350,000,000.00	1 dokumen	350,000,000.00	1.00 dokumen	350,000,000.00	Palembang			
- Belanja Sewa Peresmian Infrastruktur	Jumlah kegiatan peresmian				2.00 Kali	150,000,000.00	2.00 Kali	150,000,000.00	2 Kali	150,000,000.00	2 Kali	150,000,000.00	2.00 Kali	150,000,000.00	Palembang			
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor (Jasa Security dan tenaga kebersihan uptd)	jumlah security dan tenaga kebersihan				26.00 orang	1,435,200,000.00	26.00 orang	1,435,200,000.00	26 orang	1,435,200,000.00	26 orang	1,435,200,000.00	26.00 orang	1,435,200,000.00	Palembang			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana		100 %	9,176,100,000.00	100.00 %	12,154,577,682.00	100.00 %	8,030,750,000.00	100 %	8,063,000,000.00	100 %	8,095,250,000.00	100.00 %	8,127,500,000.00	Provinsi Sumsel		Pertumbuhan Ekonomi	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		75 Unit	1,970,000,000.00	75.00 Unit	1,970,000,000.00	75.00 Unit	2,300,000,000.00	75 Unit	2,300,000,000.00	75 Unit	2,300,000,000.00	75.00 Unit	2,300,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Biaya Pemeliharaan Kendaraan operasional roda 4 dan Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)				75.00 unit	250,000,000.00	75.00 unit	350,000,000.00	75 unit	350,000,000.00	75 unit	350,000,000.00	75.00 unit	350,000,000.00	Palembang			
- Penggantian Suku Cadang Kendaraan operasional roda 4 dan Roda 2	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)				75.00 unit	500,000,000.00	75.00 unit	500,000,000.00	75 unit	500,000,000.00	75 unit	500,000,000.00	75.00 unit	500,000,000.00	Palembang			
- Pajak Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)				75.00 unit	150,000,000.00	75.00 unit	150,000,000.00	75 unit	150,000,000.00	75 unit	150,000,000.00	75.00 unit	150,000,000.00	Palembang			
- Pembelian BBM Kendaraan Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang dipelihara (unit)				75.00 unit	1,070,000,000.00	75.00 unit	1,300,000,000.00	75 unit	1,300,000,000.00	75 unit	1,300,000,000.00	75.00 unit	1,300,000,000.00	Palembang			
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara		12 Bln	59,000,000.00	1.00 Unit	60,000,000.00	1.00 Unit	70,000,000.00	1.00 Unit	70,000,000.00	1.00 Unit	70,000,000.00	1.00 Unit	70,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Bln	3,007,350,000.00	2.00 Unit	3,142,000,000.00	2.00 Unit	3,450,750,000.00	2.00 Unit	3,483,000,000.00	2.00 Unit	3,515,250,000.00	2.00 Unit	3,547,500,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Pemeliharaan peralatan kantor	Jumlah Peralatan yang dipelihara				1.00 Paket	225,000,000.00	1.00 Paket	240,750,000.00	1 Paket	243,000,000.00	1 Paket	245,250,000.00	1.00 Paket	247,500,000.00	Palembang			
- Pemeliharaan Alat-Alat Kebinamargaan	Jumlah alat-alat berat kebinamargaan yang dipelihara (unit)				1.00 Paket	2,917,000,000.00	1.00 Paket	3,210,000,000.00	1 Paket	3,240,000,000.00	1 Paket	3,270,000,000.00	1.00 Paket	3,300,000,000.00	Palembang			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1 unit	4,139,750,000.00	2.00 unit	6,982,577,682.00	1.00 unit	2,210,000,000.00	1 unit	2,210,000,000.00	1 unit	2,210,000,000.00	1.00 unit	2,210,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				2.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	Provinsi Sumsel			
- Rehab Berat Gedung Dinas	Jumlah gedung yang direhab				1.00 Unit	2,962,577,682.00	1.00 Unit	2,200,000,000.00	1 Unit	2,200,000,000.00	1 Unit	2,200,000,000.00	1.00 Unit	2,200,000,000.00	Provinsi Sumsel			
- Rehab Berat Gedung Workshop	Jumlah gedung yang direhab				1.00 Unit	4,000,000,000.00									Provinsi Sumsel			
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI				2,807,575,000.00		4,848,000,000.00		5,590,000,000.00		6,380,000,000.00		6,520,000,000.00		6,590,000,000.00				
Administrasi Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Laporan		100 %	223,500,000.00	7.00 Dokumen	512,000,000.00	7.00 Dokumen	850,000,000.00	7 Dokumen	850,000,000.00	7 Dokumen	850,000,000.00	7.00 Dokumen	850,000,000.00	Provinsi Sumsel			

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN																	
Organisasi Perangkat Daerah		: Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan															
Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD		2 Laporan	223,500,000.00	2.00 Laporan	512,000,000.00	2.00 Laporan	850,000,000.00	2 Laporan	850,000,000.00	2 Laporan	850,000,000.00	2.00 Laporan	850,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	Jumlah Laporan Monitoring dan Pengawasan Mutu Konstruksi				2.00 Dokumen	512,000,000.00	2.00 Dokumen	850,000,000.00	2.00 Dokumen	850,000,000.00	2.00 Dokumen	850,000,000.00	2.00 Dokumen	850,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pengendalian Manajemen Mutu (Uji Petik)	jumlah laporan pengendaliain manajemen mutu				1.00 dokumen	230,000,000.00	1.00 dokumen	420,000,000.00	1 dokumen	420,000,000.00	1 dokumen	420,000,000.00	1.00 dokumen	420,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Monitoring dan Pengawasan Mutu Konstruksi	jumlah laporan monitoring dan Pengawasan Mutu Konstruksi				1.00 dokumen	282,000,000.00	1.00 dokumen	430,000,000.00	1 dokumen	430,000,000.00	1 dokumen	430,000,000.00	1.00 dokumen	430,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan kepegawaian		100 %	266,000,000.00	4.00 Dokumen	359,000,000.00	4.00 Dokumen	360,000,000.00	4 Dokumen	380,000,000.00	4 Dokumen	400,000,000.00	4.00 Dokumen	420,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		1 Tahun	266,000,000.00	25.00 Orang	359,000,000.00	1.00 Tahun	360,000,000.00	1 Tahun	380,000,000.00	1 Tahun	400,000,000.00	1.00 Tahun	420,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan				25.00 Orang	359,000,000.00	30.00 Orang	360,000,000.00	30 Orang	380,000,000.00	30 Orang	400,000,000.00	30.00 Orang	420,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pelatihan SDM Labororium Bahan Konstruksi	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat/pelatihan				25.00 Orang	359,000,000.00	25.00 Orang	360,000,000.00	25 Orang	380,000,000.00	25 Orang	400,000,000.00	25.00 Orang	420,000,000.00	Palembang		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan administrasi PD				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	50,000,000.00	3 layanan	65,000,000.00	3 layanan	80,000,000.00	3.00 layanan	80,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1 Paket	30,000,000.00	1.00 Paket	30,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				12.00 Paket	18,000,000.00	12.00 Paket	20,000,000.00	12 Paket	25,000,000.00	12 Paket	30,000,000.00	12.00 Paket	30,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	15,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1.00 Paket	25,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Labororium Bahan Konstruksi	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				12.00 Bulan	12,000,000.00	12.00 Bulan	15,000,000.00	12 Bulan	20,000,000.00	12 Bulan	25,000,000.00	12.00 Bulan	25,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	15,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00	1 Paket	25,000,000.00	1.00 Paket	25,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Labororium Bahan Konstruksi	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12,000,000.00	12.00 Paket	15,000,000.00	12 Paket	20,000,000.00	12 Paket	25,000,000.00	12.00 Paket	25,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah layanan jasa PD				1.00 layanan	75,000,000.00	1.00 layanan	80,000,000.00	1 layanan	85,000,000.00	1 layanan	90,000,000.00	1.00 layanan	90,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	75,000,000.00	12.00 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	85,000,000.00	12 Laporan	90,000,000.00	12.00 Laporan	90,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					75,000,000.00		80,000,000.00		85,000,000.00		90,000,000.00		90,000,000.00	Palembang		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan BMD		100 %	1,198,250,000.00	7.00 unit	1,200,000,000.00	7.00 unit	1,300,000,000.00	7 unit	1,500,000,000.00	7 unit	1,500,000,000.00	7.00 unit	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		3 Unit	1,198,250,000.00	3.00 Unit	1,200,000,000.00	3.00 Unit	1,300,000,000.00	3 Unit	1,500,000,000.00	3 Unit	1,500,000,000.00	3.00 Unit	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	Jumlah pengadaan peralatan				1.00 set	1,200,000,000.00	1.00 set	1,300,000,000.00	1 set	1,500,000,000.00	1 set	1,500,000,000.00	1.00 set	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi	Jumlah pengadaan peralatan				1.00 set	1,200,000,000.00	1.00 set	1,300,000,000.00	1 set	1,500,000,000.00	1 set	1,500,000,000.00	1.00 set	1,500,000,000.00	Palembang		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Kinerja Perangkat Daerah		100 %	753,000,000.00	100.00 %	2,293,175,000.00	100.00 %	2,500,000,000.00	100 %	3,000,000,000.00	100 %	3,000,000,000.00	100.00 %	3,000,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		12 Bln	744,750,000.00	12.00 Bln	1,300,000,000.00	12.00 Bln	1,300,000,000.00	12 Bln	1,500,000,000.00	12 Bln	1,500,000,000.00	12.00 Bln	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	Jumlah alat-alat laboratorium yang disertifikasi/Kalibrasi/diperbaiki (Set)				1.00 Paket	1,300,000,000.00	1.00 Paket	1,300,000,000.00	1 Paket	1,500,000,000.00	1 Paket	1,500,000,000.00	1.00 Paket	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Kebinamargaan	Jumlah alat-alat laboratorium yang disertifikasi/Kalibrasi/diperbaiki (Set)				1.00 Paket	1,300,000,000.00	1.00 Paket	1,300,000,000.00	1 Paket	1,500,000,000.00	1 Paket	1,500,000,000.00	1.00 Paket	1,500,000,000.00	Palembang		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4 unit	8,250,000.00	4.00 unit	993,175,000.00	4.00 unit	1,200,000,000.00	4 unit	1,500,000,000.00	4 unit	1,500,000,000.00	4.00 unit	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD LABORATORIUM BAHAN KONSTRUKSI	Jumlah gedung yang direhab				1.00 Unit	993,175,000.00	1.00 Unit	1,200,000,000.00	1 Unit	1,500,000,000.00	1 Unit	1,500,000,000.00	1.00 Unit	1,500,000,000.00	Provinsi Sumsel		Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	10,000,000.00	1.00 Paket	10,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	1 Paket	15,000,000.00	1.00 Paket	15,000,000.00	Provinsi Sumsel		
- Rehab Gedung Laboratorium	Jumlah gedung yang direhab				1.00 Unit	983,175,000.00	1.00 Unit	1,190,000,000.00	1 Unit	1,485,000,000.00	1 Unit	1,485,000,000.00	1.00 Unit	1,485,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase meningkatnya pelayanan kesehatan BLUD		100 %	366,825,000.00	100.00 %	366,825,000.00	100.00 %	450,000,000.00	100 %	500,000,000.00	100 %	600,000,000.00	100.00 %	650,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	350,000,000.00	1.00 Unit Kerja	366,825,000.00	1.00 Unit Kerja	450,000,000.00	1 Unit Kerja	500,000,000.00	1 Unit Kerja	600,000,000.00	1.00 Unit Kerja	650,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU				-		512,000,000.00		5,112,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor			1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Kab. OKU			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia			1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	Kab. OKU			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. OKU			
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi			1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKU	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Kab. OKU			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana			100.00 %	420,000,000.00	100.00 %	5,020,000,000.00							Provinsi Sumsel			
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1.00 Unit	420,000,000.00	1.00 Unit	5,020,000,000.00							Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket			1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00										
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Mess Banding Agung Kab. OKU	Jumlah gedung yang dipelihara			1.00 Gedung	400,000,000.00									Kab. Muba			
- Penataan Lingkungan Perkantoran Gedung UPTD Kab. OKU	Jumlah gedung yang dipelihara																
- Rehabilitasi Gedung Mess Banding Agung Kab. OKU	Jumlah gedung yang dipelihara					1.00 Gedung	5,000,000,000.00							Kab. Muba			
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKUT				-	1,312,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00				
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana			3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKUT	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor			1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Kab. OKUT			
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi	
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKUT	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. OKUT			
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.0					

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim				-		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Kab. Muara Enim		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. Muara Enim		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. Muara Enim		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muara Enim	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Kab. Muara Enim		
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat				-		512,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Kab. Lahat		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. Muba		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. Muba		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Lahat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Kab. Muba		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana				100%	420,000,000.00									Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	420,000,000.00									Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	20,000,000.00											
- Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Kab. Lahat	Jumlah gedung yang dipelihara				1.00 Gedung	400,000,000.00									Kab. Lahat		
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKI				-		92,000,000.00		1,512,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKI	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Kab. OKI		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKI	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Kab. OKI		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKI	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				12.00 Paket	12,000,000.00	12.00 Paket	12,000,000.00	12 Paket	12,000,000.00	12 Paket	12,000,000.00	12.00 Paket	12,000,000.00	Kab. OKI		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	1.00 layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten OKI	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12 Laporan	50,000,000.00	12.00 Laporan	50,000,000.00	Kab. OKI		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana						100%	1,420,000,000.00							Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						1 Unit	1,420,000,000.00							Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket						1 Paket	20,000,000.00									
- Penataan Lingkungan dan Pemeliharaan Kantor Gedung UPTD Kab. OKI	Jumlah gedung yang dipelihara						1 Gedung	1,400,000,000.00							Kab. OKI		
UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang					-			1,342,000,000.00		122,000,000.00		122,000,000.00		122,000,000.00			
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	3.00 layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1 Paket	18,000,000.00	1.00 Paket	18,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	1 Paket	12,000,000.00	1AB613 Paket	12,000,000.00	1.00 Paket	12,000,000.00	Palembang		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00 layanan	80,000,000.00	1.00 layanan	80,000,000.00	1.00 layanan	80,000,000.00	1.00 layanan	80,000,000.00	1.00 layanan	80,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00 Laporan	80,000,000.00	12.00 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	80,000,000.00	12 Laporan	80,000,000.00	12.00 Laporan	80,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00		80,000,000.00	Palembang		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana				100.00 %	10,000,000.00	100 %	1,220,000,000.00							Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	10,000,000.00	1 Unit	1,220,000,000.00							Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	10,000,000.00	1 Paket	20,000,000.00									
- Pemeliharaan Gedung Kantor UPTD Kota Palembang	Jumlah gedung yang dipelihara						1 Gedung	1,200,000,000.00							Palembang		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET			
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN		
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)					
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten MUBA				-		92,000,000.00		812,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00	Paket	18,000,000.00	1.00	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muba	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00	Paket	18,000,000.00	1.00	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	Kab. Muba		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muba	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Kab. Muba		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muba	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Kab. Muba		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	12	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Muba	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	12	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	Kab. MUBA		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana							100	%	720,000,000.00							Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1	Unit	720,000,000.00							Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket							1	Paket	20,000,000.00									
- Pemeliharaan Rumah Dinas Kantor UPTD Kab. Muba	Jumlah gedung yang dipelihara							1	Gedung	700,000,000.00							Kab. Muba		
UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten MURA				-		912,000,000.00		912,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00		92,000,000.00					
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi Umum yang terlaksana				3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	3.00	layanan	42,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1.00	Paket	18,000,000.00	1.00	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Alat Tulis Kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Mura	Jumlah layanan penyediaan alat tulis kantor				1.00	Paket	18,000,000.00	1.00	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	1	Paket	18,000,000.00	Kab. Mura		
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
Pengadaan bahan kebersihan kantor UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Mura	jumlah bahan kebersihan kantor yang tersedia				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Kab. Mura		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Mura	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1.00	Paket	12,000,000.00	1.00	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	1	Paket	12,000,000.00	Kab. Mura		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase jasa Penunjang yang terpenuhi				1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	1.00	layanan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	12	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Penyedian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPTD Jalan dan Jembatan Kabupaten Mura	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12.00	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	12	Laporan	50,000,000.00	12.00	Laporan	50,000,000.00	Kab. Mura		

TABEL RENCANA PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN

Organisasi Perangkat Daerah : Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

Bidang Urusan / Program / Outcome / Kegiatan / Sub Kegiatan Output	Indikator Outcome / Output	Baseline 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												LOKASI	KET	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			12PS	ProSN
			Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)	Target	Pagu Anggaran (Rp)			
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terlaksana				100.00 %	820,000,000.00	100.00 %	820,000,000.00							Provinsi Sumsel		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1.00 Unit	820,000,000.00	1.00 Unit	820,000,000.00							Provinsi Sumsel	Sumsel Berintegritas dan Melayani	Pertumbuhan Ekonomi
- Belanja Administrasi Kegiatan	Jumlah Paket				1.00 Paket	20,000,000.00	1.00 Paket	20,000,000.00									
- Penataan Kawasan Perkantoran Gedung UPTD Kab. Mura	Jumlah gedung yang dipelihara				1.00 Gedung	800,000,000.00	1.00 Gedung	800,000,000.00							Kab. Mura		
TOTAL				926,288,384,820.00		614,150,108,897.00		1,226,959,864,745.00		1,305,269,194,113.00		1,304,579,280,938.00		1,379,383,515,700.00			

RINCIAN KOMPONEN BELANJA RANCANGAN AKHIR RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

PERANGKAT DAERAH : DINAS PU BINA MARGA DAN TATA RUANG

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	3	3	3	3	3	4
I.	BELANJA OPERASI	106,013,551,360	100,864,929,400	128,679,931,275	140,492,507,275	141,636,720,300	146,916,997,048	
1.	Belanja Pegawai :	37,528,708,000	42,595,572,000	42,595,572,000	42,595,572,000	42,595,572,000	42,595,572,000	
	a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	20,997,853,000	25,400,805,000	25,400,805,000	25,400,805,000	25,400,805,000	25,400,805,000	
	1) Belanja Gaji Pokok ASN	14,506,274,000	18,638,815,000	18,638,815,000	18,638,815,000	18,638,815,000	18,638,815,000	
	2) Belanja Tunjangan Keluarga ASN	1,590,688,000	2,165,163,000	2,165,163,000	2,165,163,000	2,165,163,000	2,165,163,000	
	3) Belanja Tunjangan Jabatan ASN	630,396,000	573,570,000	573,570,000	573,570,000	573,570,000	573,570,000	
	4) Belanja Tunjangan Fungsional ASN	33,785,000	34,082,000	34,082,000	34,082,000	34,082,000	34,082,000	
	5) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	482,084,000	705,653,000	705,653,000	705,653,000	705,653,000	705,653,000	
	6) Belanja Tunjangan Beras ASN	866,479,000	1,211,618,000	1,211,618,000	1,211,618,000	1,211,618,000	1,211,618,000	
	7) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	125,224,000	246,355,000	246,355,000	246,355,000	246,355,000	246,355,000	
	8) Belanja Pembulatan Gaji ASN	253,000	424,000	424,000	424,000	424,000	424,000	
	9) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	2,614,001,000	1,552,995,000	1,552,995,000	1,552,995,000	1,552,995,000	1,552,995,000	
	10) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	34,818,000	44,734,000	44,734,000	44,734,000	44,734,000	44,734,000	
	11) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	104,447,000	134,201,000	134,201,000	134,201,000	134,201,000	134,201,000	
	12) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	9,404,000	93,195,000	93,195,000	93,195,000	93,195,000	93,195,000	
	b. Belanja Pegawai Lainnya ASN	16,530,855,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	
	1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN	16,530,855,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN							
	- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN	16,530,855,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	17,194,767,000	
	2) Belanja Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	-	-	-	-	-	
	- Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah							
	- Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD							
	- Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD							
	- Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN							
	- Belanja Honorarium (Penanggungjawab Pengelola Keuangan, Pengadaan Barang/Jasa, Perangkat Unit Kerja Pengadaan/Jasa)							
	- Belanja Jasa Pengelolaan BMD							
	3) Belanja Pegawai BOS							
	4) Belanja Pegawai BLUD							
	5) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD							
	6) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH							
2.	Belanja Barang dan Jasa	68,484,843,360	58,269,357,400	86,084,359,275	97,896,935,275	99,041,148,300	104,321,425,048	
3.	Belanja Bunga							
4.	Belanja Subsidi							
5.	Belanja Hibah	-	-	-	-	-	-	

No	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)						KETERANGAN
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	3	3	3	3	3	4
	1) Hibah Kepada.....							
	2) Hibah Kepada.....							
	3) Hibah Kepada.....							
	4) Hibah Kepada.....							
	5) dst.....							
	6. Belanja Bantuan Sosial	-	-	-	-	-	-	
	1) Bantuan Sosial Kepada.....							
	2) Bantuan Sosial Kepada.....							
	3) Bantuan Sosial Kepada.....							
	4) Bantuan Sosial Kepada.....							
	5) dst.....							
II.	BELANJA MODAL	820,274,833,460	513,285,179,497	1,098,279,933,470	1,164,776,686,838	1,162,942,560,638	1,232,466,518,653	
	a. Belanja Modal Tanah	2,820,000,000	2,900,000,000	235,850,000,000	285,850,000,000	205,850,000,000	225,850,000,000	
	b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7,541,300,000	8,100,000,000	9,073,700,000	9,350,800,000	5,623,900,000	7,917,000,000	
	c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5,405,000,000	13,235,752,682	13,430,000,000	3,685,000,000	3,685,000,000	3,685,000,000	
	d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	804,423,533,460	488,549,426,815	839,526,233,470	865,590,886,838	947,483,660,638	994,614,518,653	
	e. Belanja Modal Aset Lainnya	85,000,000	500,000,000	400,000,000	300,000,000	300,000,000	400,000,000	
	f. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		-					
III.	BELANJA TIDAK TERDUGA		-					
IV.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-	-	-	
	1. Belanja Bagi Hasil		-					
	2. Belanja Bantuan Keuangan							
	TOTAL BELANJA (I + II + III + IV)	926,288,384,820	614,150,108,897	1,226,959,864,745	1,305,269,194,113	1,304,579,280,938	1,379,383,515,700	



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Tlp. (0711) 313431 FAX (0711) 321053 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 050/0502/DIS.PUBMTR/2025

TENTANG :

PENYUSUNAN TIM RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;

26. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 52);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatea Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama :

Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029, adalah sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1.	Ir. M. Affandi, S.T., MSc., IPU., ASEAN Eng.	Pengarah	Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
			Ruang Provinsi Sumatera Selatan
2.	Ir. Ridwan, M.M.	Ketua	Sekretaris Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
3.	Ir. Hendry Wijaya, S.T., M.M., IPM.	Wakil Ketua	Kabid Pengembangan Jaringan Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
4.	Riliane Prima Winanri, S.T., M.T.	Sekretaris	Unsur Sekretariat
5.	Ir. Adrifan, S.T., M.T.	Anggota	Kabid Jalan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
6.	Ir. H. Yudho Joko Prasetyo, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota	Kabid Jembatan Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
7.	Ir. Rizal Hermansyah, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng.	Anggota	Kabid Pengujian, Peralatan dan BMD Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
8.	Ir. Faustino Do Carmo, S.T., M.Si.	Anggota	Kabid Penataan Ruang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
9.	A. Parliansyah, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Lahat Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
10.	Popo Hartopo, S.T.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKU Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
11.	Ardani Saputra, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MUBA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
12.	Ir. Ida Pebriani, S.T., M.T.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kota Palembang Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
13.	Ir. M. Iqbal Dewanto, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKI Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
14.	H. Erdius Lantang, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. MURA Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
15.	Ricky Meiza, S.T, M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. Muara Enim Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
16.	Ir. Frenci Ali Mardoni, S.T., M.M.	Anggota	Kepala UPTD Jalan dan Jembatan Kab. OKUT Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
17.	Ir. Enny Eliaroza, S.T., M.T., IPM.	Anggota	Kepala UPTD Laboratorium Bahan Konstruksi Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan
18.	Dru Wismawan, S.E., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
19.	Hj. Yossy Marissa, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
20.	Dedi Hendra, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
21.	Ir. Sudirmansyah, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
22.	Ir. Upik, S.T., M.Si.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
23.	Ir. A. Abraham S. Armo, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
24.	M. Rino Abi Susanto, S.E., S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
25.	Ir. Jayanto Fajri Ilham, S.T., M.T.	Anggota	Unsur Bidang Jembatan
26.	Yutipiliana, S.E., S.T., M.Si.	Anggota	Unsur Sekretariat
27.	Chotimah Agustia, S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
28.	Dysi Adinda Putri, S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
29.	Pebriani Safitri, S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
30.	Wulan Anggraini Utami, S.T.	Anggota	Unsur Bidang Jalan
31.	Boni Marciano Syahrizal, S.T	Anggota	Unsur Bidang Pengembangan Jaringan Jalan
32.	Rahmawaty, A. Md	Anggota	Unsur Sekretariat
33.	Nur Fitriana	Anggota	Unsur Sekretariat
34.	Herlina, S.E	Anggota	Unsur Sekretariat
35.	Sepri Anthony, S.T	Anggota	Unsur Sekretariat

- Kedua : Menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan ini.
- Ketiga : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan apabila ada kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palembang

Pada tanggal : 6 Januari 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**



Ir. M. AFFANDI, S.T., MSc., IPU., ASEAN Eng.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19701230 199203 1 002



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG

Jalan Ade Irma Nasution No. 10 Tlp. (0711) 313431 FAX (0711) 321053 Palembang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR : 050/5857/DIS.PUBMTR/2025

TENTANG :

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 perlu dibentuk Tim Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan tentang Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pembentukan Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952).
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
22. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
23. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1120);
24. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 118);
25. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;

26. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: 15/SE/Db/2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender;
27. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 7);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 06);
31. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Perlindungan dan Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Disabilitas (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 52);
32. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 47 Tahun 2015 tentang Panduan Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 47);
33. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Uraian Tugas dan Fungsi Unit Pelaksanan Teknis Dinas di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan.
34. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan;
35. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 32 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020-2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 35).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 merupakan Penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur Sumatera Selatan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;

- Kedua : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 memuat Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Sasaran, Program dan rencana tahunan;
- Ketiga : Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;
- Keempat : Renstra Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Sumatera Selatan tahun 2025 – 2029 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Tahunan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang;
- Kelima : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Keenam : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang mengevaluasi capaian pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029;
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di : Palembang
Pada tanggal : 6 Oktober 2025

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
BINA MARGA DAN TATA RUANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN,**


Ir. M. Affandi, S.T., M.Sc., IPU., ASEAN Eng.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701230-199203 1 002